



MINGGU IV MARET 2024

• TABLOID REFERENSI PEMILU 2024 •

Info Indonesia

@ Rp 20.000,-



GANJAR ANIES

MENGGANAS DI MK

PERSAINGAN
PILGUB
SUMSEL RASA
PILPRES

KABINET
PRABOWO-
GIBRAN
PASTI RASA
JOKOWI

PREDIKSI TIGA
PASANG
CAWAKO
PALEMBANG

USULAN
HAK
ANGKET
KURANG
GREGET

KAESANG
TINGGAL PILIH
SOLO ATAU
JAKARTA

EVALUASI
PEMILU 2024
PERSIAPAN
HADAPI
PILKADA

GANJAR PILIH
OPOSISI
TOLAK POSISI
MENTERI

“Pak Prabowo kan mengatakan Pak Jokowi itu mentor beliau, di acara-acara internal Pak Prabowo berulang kali menyampaikan kepada kami bahwa beliau belajar banyak dari Pak Jokowi”

Habiburokhman



Lawan

Perjalanan demokrasi di Tanah Air mulai memasuki babak baru di mana Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 2024 pada 27 Maret 2024. Hal itu disebutkan Ketua MK, Suhatoyo, dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024.

Dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dijelaskan, MK mempunyai waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa Pemilu 2024 sebelum membacakan putusan. Meskipun sidang perdana digelar pada 27 Maret, tetapi argo 14 hari kerja itu sudah terhitung sejak 25 Maret. Karena tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara.

Dalam sidang hari pertama di MK, Anies Baswedan merasa Pilpres 2024 yang telah dilaksanakan tidak dijalankan secara bebas, jujur dan adil. Dia menyatakan hasil penghitungan suara di Pemilu 2024 tidak mencerminkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Anies mengatakan Pemilu 2024 diwarnai dengan intervensi oleh penguasa, sehingga diharapkan majelis hakim konstitusi menganggap penting hal ini.

Dia menyebut penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres 2024 terpampang secara nyata dan telah mencoreng. Independensi yang menjadi pilar pertama Pemilu justru tergerus oleh intervensi kekuasaan.

Lalu, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Indonesia pernah pada satu titik untuk mewujudkan reformasi. Momentum di mana masyarakat mengoreksi pemerintahan yang saat itu melenceng, membelenggu kebebasan warga, menebar ketakutan, dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya.

Namun saat ini, ia menyindir adanya pihak yang melupakan semangat reformasi yang diperjuangkan rakyatnya pada masa lalu. Pihak yang menghalalkan kecurangan untuk meraih kembali kekuasaan, yang ditegaskannya tak sejalan dengan semangat reformasi.

Kuasa hukum Ganjar-Mahfud dalam petitumnya bahkan meminta agar MK membatalkan keputusan KPU soal penetapan hasil Pilpres 2024.

Dalam petitum lainnya, mereka meminta agar pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2024, sehingga diulang hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Di sisi lain, Prabowo kini dihadapkan pada posisi untuk menentukan susunan kabinetnya ke depan. Dia mengakui tak malu menjadikan Presiden Jokowi sebagai mentor dan meminta pendapat untuk penyusunan kabinetnya. Sehingga kemungkinan kabinet Prabowo-Gibran akan punya rasa Jokowi.

Beragam rangkuman berita ter-update terkait perpolitikan Tanah Air dalam sepekan kami sajikan sebagai referensi para pembaca Info Indonesia. Mulai dari dinamika partai politik, pemilihan kepala daerah, dan isu terkini lainnya.

Selamat membaca!!!●



info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO
Sertifikat Dewan Pers
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan

PEMIMPIN REDAKSI: Rusdiyono

WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani

REDAKTUR: Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina

REPORTER: Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles

TATA LETAK: Sujatmiko

MEDIA SOSIAL: Haidir Ali

KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida

SEKRETARIS REDAKSI: Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: M. Iqbal, Zul Fahmi

ADMINISTRASI: Ega Tri Gustina

DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/

PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

TELP 021-791 96781 FAX 021-791 96786

PALEMBANG Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30126

TELP : 0711-7442344



“Pak Prabowo yang akan menentukan, ya. Mungkin (Presiden Jokowi memberi) masukan, tetapi penentuannya di Pak Prabowo, ya”

Gibran Rakabuming Raka

KABINET PRABOWO-GIBRAN PASTI RASA JOKOWI

Prabowo Subianto sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi yang tertinggi raihan suaranya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, walaupun masih harus menunggu hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski begitu, dengan peluang yang sangat terbuka menjadi Presiden ke-8 RI, Prabowo kini mulai menyusun siapa yang akan masuk dalam kabinet di pemerintahannya untuk periode 2024-2029. Bahkan, untuk menyusun kabinet itu, Prabowo masih membutuhkan peran dari Presiden Joko Widodo.

Prabowo menegaskan, segenap pihak yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju tidak ragu dan malu menjadi penerus Presiden Jokowi.

“Kita di sini, Koalisi Indonesia Maju, kita tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu mengatakan kita adalah penerus-penerus Presiden Joko Widodo,” tegas Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam agenda silaturahmi dan buka bersama di Kuningan, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

Menurut Prabowo, bangsa yang baik dan terhormat adalah bangsa yang menghormati pemimpin-pemimpinnya. Prabowo juga mengaku menghormati presiden-presiden Indonesia sebelumnya dan bertekad memperbaiki hal yang masih dianggap kurang maksimal.

“Saudara-saudara, tujuan kita jelas. Kita membangun di atas landasan yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh presiden-presiden sebelum kita, itu kita akui, itu kita hormati. Kita hormati seluruh presiden sebelum kita, kita mengakui kekuatan dan kekurangan kita, tapi kita bertekad untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut,” tuturnya.

Di sisi lain, Prabowo yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024 itu mengatakan, kemenangannya dan Gibran Rakabuming Raka adalah kemenangan rakyat Indonesia. Ia mengucapkan terima kasih kepada para pendukung.

“Saya ucapkan terima kasih bahwa saudara-saudara percaya dengan saya. Saya menganggap diri saya dan Gibran Rakabuming Raka, kami hanya pembawa bendera, kami hanya pembawa pen-

jur, kami hanya perwakilan dari saudara-saudara semuanya,” ucap Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra ini pun melabeli dirinya dan Gibran sebagai simbol dari cita-cita dan keinginan rakyat.

“Tokoh-tokoh nasional yang begitu hebat yang ada di depan saya ini, mereka mendukung saya, mereka mendukung Gibran, bukan karena Prabowo hebat, bukan karena Gibran hebat, tapi karena Prabowo dan Gibran simbol dari cita-cita rakyat kita, simbol dari keinginan rakyat kita,” katanya.

Prabowo juga berjanji akan menerima amanat rakyat sebagai penugasan yang mulia dan akan melaksanakannya dengan sepenuh hati serta tanggung jawab.

“Amanat ini saya terima sebagai penugasan yang mulia, sebagai tugas oleh rakyat Indonesia yang akan saya laksanakan dengan sepenuh hati saya, dengan penuh rasa tanggung jawab kepada rakyat Indonesia,” imbuh Prabowo.

Terpisah, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Prabowo akan menentukan susunan kabinet pemerintahannya, sementara Presiden Jokowi akan memberi masukan.

“Pak Prabowo yang akan menentukan, ya. Mungkin (Presiden Jokowi memberi) masukan, tetapi penentuannya di Pak Prabowo, ya,” ucap Gibran.

Kendati susunan kabinet ditentukan Prabowo, ia mengaku juga akan dilibatkan dalam pembicaraan menggodok pemerintahan selanjutnya. Gibran mengatakan pembicaraan itu sudah dimulai.

“Pasti (dilibatkan). Sudah lama dari kemarin-kemarin. Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin,” tambahnya.

Namun, Gibran enggan membeberkan sudah sejauh mana pembicaraan mengenai penyusunan kabinet tersebut. Ia menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada partai politik dari kubu rival yang diajak bergabung dalam kabinet mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengamini pernyataan Gibran yang menyebut Presiden Jokowi memberikan masukan terkait kabinet periode 2024-2029 kepada Prabowo Subianto.

“Saya tidak tahu, secara institusional tidak tahu, tapi secara prinsip memang Pak Jokowi dipastikan menjadi salah satu orang yang paling banyak dimintai pendapat oleh Pak Prabowo, saya yakin,” ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024.

“Pak Prabowo kan mengatakan Pak Jokowi itu mentor beliau, di acara-acara internal Pak Prabowo berulang kali menyampaikan kepada kami bahwa beliau belajar banyak dari Pak Jokowi,” imbuhnya.

Menurut Habiburokhman, Prabowo melihat Jokowi sebagai sosok pemimpin yang bekerja keras tak kenal lelah untuk rakyatnya. Termasuk cara mantan wali kota Solo itu dalam mengambil keputusan yang tepat.

“Jadi Pak Prabowo kan melanjutkan capaian dan legacy-nya Pak Jokowi, ke mana kalau ingin melanjutkan capaian Pak Jokowi? Ya ke Pak Jokowi lah nanyanya,” ujar Habiburokhman.

Di samping itu, ia mengatakan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai pemenang Pilpres

2024. Namun, saat ini proporsi kabinetnya nanti sudah dibicarakan dengan para ketua umum partai politik.

Prabowo dalam beberapa waktu terakhir kerap bertemu dengan ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Ia yakin, dalam pertemuan tersebut juga disinggung soal kabinet periode 2024-2029.

“Secara substansi, hal ihwal terkait proporsi kabinet, menurut saya sih sudah dibicarakan. Kan Pak Prabowo juga sudah banyak melakukan pertemuan dengan para ketua-ketua umum ya, ada yang rame-rame, ada yang khusus juga,” ujar Habiburokhman.

Prabowo, ungkap Habiburokhman, menginginkan komposisi kabinet yang bisa diandalkan untuk melakukan kerja-kerja cepat. Tujuannya agar para pembantunya di kabinet dapat segera melakukan penyesuaian setelah Prabowo dilantik pada 20 Oktober mendatang.

“Langsung gas pol, kerja, bagaimana mencapai target-target yang disampaikan dalam visi-misi dan program pemilu ini,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, membantah kabar bahwa Presiden Jokowi telah menitipkan sejumlah nama menteri di kabinet selanjutnya. Menurut Budi Arie, isu tersebut hanya gosip belaka.

Kendati demikian, Budi Arie tak mempermasalahkan jika ada pihak yang merekomendasikan sejumlah nama. Menurut dia, hal itu sebagai bentuk demokrasi.

“Usulan boleh aja. Kalian ngusulin siapa juga boleh enggak dilarang. Namanya demokrasi. Kalian yang usulin semua juga boleh, emak kamu diusul juga boleh. Namanya usul juga, bukan nitip dong beda. Kalau nitip kan wah,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

Meski begitu, Budi Arie tak membeberkan soal nama-nama yang telah direkomendasikan untuk masuk ke kabinet Prabowo-Gibran.

Budi Arie juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, hingga kini susunan menteri di pemerintahan selanjutnya masih belum dibahas.

Selain itu, Budi Arie juga menegaskan tidak ada tim transisi pemerintahan. “Gak ada transisi. Ini Pak Prabowo rapat terus,” ujarnya.●RDO



“Kalau kita diamkan proses pemilu yang curang, maka ini akan menjadi role model, contoh Pilkada”

Ari Yusuf Amir



MASA DEPAN DEMOKRASI DITENTUKAN HAKIM KONSTITUSI

Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, menyebut Pemilu 2024 tidak mencerminkan kualitas demokrasi.

Anies mengatakan, proses pemilu telah selesai dan hasilnya telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, yang perlu di garis bawahi adalah adanya suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi.

“Setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari persiapan awal hingga pengumuman, haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan, dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas. Ini bukan sekadar ada di teks, tapi ini pondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, yang stabil, dan yang berkelanjutan,” kata Anies membuka persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di depan para 8 Hakim Konstitusi di Gedung MK, Rabu, 27 Maret 2024.

Anies menuturkan, pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan terpilih, yang mana hal itu bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat pondasi institusi pemerintah.

“Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas dari pemerintah yang terpilih akan diragukan. Lebih jauh lagi, pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan,” katanya.

Di depan hakim MK, Anies juga bertanya apakah Indonesia akan menjadi negara yang menghargai dan menghargai perjuangan konstitusi.

“Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan apakah Republik Indonesia yang kita cintai akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law, apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekadar alat untuk pelanggaran kekuasaan tanpa pengawasan (rule by law)?” tanya Anies.

“Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pili-

hannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi. Atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara ologarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas,” katanya.

Menurut Anies, Indonesia sedang menghadapi titik krusial apakah akan melanjutkan negara sebagai demokrasi yang matang atau kembali ke bayang-bayang sebelum era reformasi.

“Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi,” imbuh Anies.

Di sisi lain, Anies menanggapi tuduhan Tim Pembela Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menyebut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2024 sebagai cengeng.

“Nanti kita lihat prosesnya (di Mahkamah Konstitusi). Ini bukan jawab menjawab di luar pengadilan ya, ini bukan

sekadar sensasi,” kata Anies.

Anies mengatakan langkahnya untuk mengajukan gugatan merupakan bagian dari praktik konstitusi. Dia mengajak kubu Prabowo dan Gibran untuk melihat terlebih dahulu seluruh proses yang bergulir di MK.

“Jadi, saya menganjurkan untuk kita mengikuti proses persidangan di MK, hormati prosesnya, lalu dari situ nanti kita lihat bagaimana putusan MK,” ujar Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap agar praktik konstitusi bisa terjaga, mulai dari demokrasi hingga pengelolaan pemerintahan.

“Terjaga itu artinya apa? Demokrasi berjalan dengan baik, pengelola pemerintahan berjalan dengan baik. Ketika ada pemilihan pun, maka pemilihannya yang bebas dari tekanan dan ancaman,” ucap Anies.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, mengaku timnya tidak gentar dengan tuduhan gugatan di MK ‘salah kamar’. Ia menganggap gugatan di MK merupakan upaya mewanti-wanti kecurangan atau pelanggaran serupa yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang bisa terjadi di Pilkada pada November 2024 mendatang.

“Kalau kita diamkan proses pemilu yang curang, maka ini akan menjadi role model, contoh Pilkada,” kata Ari, Selasa, 26 Maret 2024.

Ari mengklaim terjadi pelanggaran TSM dalam Pilpres 2024 yang akan dibuktikan nantinya dalam persidangan di MK. Dia

mengaku mengkhawatirkan hal itu berlanjut ke Pilkada dan akan menghasilkan pemimpin yang tidak terlegitimasi.

“Bayangkan di Pilkada kalau pola kecurangan ini kita biarkan, lalu diikuti di Pilkada, maka kita bisa bayangkan akan menghasilkan pemimpin atau kepala-kepala daerah yang seperti apa. Bagaimana kondisi bangsa ini nantinya,” tuturnya.

Ari mengatakan, timnya tidak akan goyah dalam upaya mengungkap kecurangan TSM dalam Pemilu 2024. Meski diketahui lawan mereka adalah pengacara-pengacara kondang di kubu Prabowo-Gibran. Ari meyakini hakim MK bisa bijak dalam menyikapi gugatan tersebut.

“Inilah yang kita sentuh, hakim MK untuk melakukan penyelamatan terhadap proses ini demi kebaikan bangsa. Jadi bukan soal menang atau kalah,” ujar dia.

THN AMIN menyampaikannya jika menang gugatan, harapannya nanti bisa dilakukan pemilu ulang. Adanya pemungutan suara ulang (PSU) itu diharapkan tanpa diikuti oleh sosok Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang dianggap menjadi sumber permasalahan dalam kecurangan pemilu tahun ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, menilai gugatan itu cacat formil. Bahkan, pengacara kondang itu tegas menyatakan bahwa gugatan tersebut salah kamar. Tidak hanya gugatan THN AMIN, tetapi juga gugatan kubu Ganjar-Mahfud.

Otto menjelaskan, gugatan PHPU yang diajukan kubu 01 dan 03 mempersoalkan proses Pilpres 2024 yang dianggap diwarnai berbagai pelanggaran atau kecurangan. Padahal, persoalan proses ataupun pelanggaran merupakan wewenang Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga Mahkamah Agung untuk mengadili.

Adapun MK, lanjut dia, berwenang mengadili perselisihan terkait hasil pemilu atau raihan suara calon. Hal itu diatur secara tegas dalam Pasal 476 UU Pemilu dan telah diadopsi ke dalam Peraturan MK.

Menurut Otto, gugatan terkait proses atau dugaan kecurangan tidak semakali termaktub dalam PMK. Apalagi, kubu 01 dan 03 dalam petitumnya meminta agar Gibran atau Prabowo-Gibran didiskualifikasi. Dia menegaskan, petitum diskualifikasi merupakan ranah Bawaslu untuk mengadili.

Karena itu, Otto menyimpulkan gugatan kubu 01 dan 03 itu cacat formil dan salah kamar. Gugatan mereka seharusnya diajukan ke kamar Bawaslu, bukan kamar MK.

Bertolak dari kesimpulan tersebut, Otto yakin Tim Pembela Prabowo-Gibran bisa ‘menghancurkan serangan-serangan’ kubu 01 dan 03 dalam persidangan. Dia bahkan memprediksi MK akan memutuskan dua perkara itu Tidak Dapat Diterima, yang berarti pokok materinya tidak diperiksa. RDO





“Kita lihat asal muasal ini adalah nepotisme. Sekali lagi nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi”

Todung Mulya Lubis

GANJAR PILIH OPOSISI TOLAK POSISI MENTERI

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, mulai berpikir realistis bahwa dirinya kalah pada Pilpres 2024 dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meski masih berupaya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyatakan akan lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang. Dia memilih berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga. Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari pemuatan kekuasaan pada satu lembaga.

“Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik, karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing, apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan,” kata Ganjar di Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024.

Ganjar pun menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol pengusung Prabowo-Gibran.

Ia menilai bahwa tawaran posisi menteri itu lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo-Gibran karena akan lebih fair. Selain itu, cukup banyak jumlah parpol yang berada di paslon 02.

Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD ini menegaskan lebih menghormati jika memberi keleluasaan kepada paslon pemenang Pilpres 2024 untuk menentukan kabinet. Lebih baik ia berada di luar pemerintahan agar demokrasi sehat.

Dia pun tetap menjalin komunikasi dengan para relawan Ganjar-Mahfud di dalam negeri dan di luar negeri untuk melakukan berbagai kegiatan. Hal ini untuk mewujudkan ide atau gagasan dengan memperhatikan realita yang berlangsung di tengah masyarakat. Misalnya, relawan Ganjar-Mahfud di Amerika Serikat telah melaksanakan pendidikan politik secara rutin agar rakyat melek politik.

“Saya bilang kepada relawan, ayo politik bisa agung kalau kita punya integritas yang

tinggi, punya niat baik yang sama. Politik menjadi hancur kalau kita hanya bicara kekuasaan,” ujarnya.

Selain itu, Ganjar menuturkan akan kembali menjadi rakyat biasa setelah MK mengumumkan putusan atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) yang dijadwalkan pada 22 April mendatang.

Dia bersama para relawan akan melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan.

Ganjar juga menyampaikan pesan kepada relawan dan pemerintahan yang akan datang. Dia berterima kasih kepada relawan pendukung Ganjar-Mahfud dan menegaskan bila tidak ada perjuangan yang sia-sia.

“Tapi takdir Allah sudah tentukan. Maka ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk rakyat, sehingga siapa pun yang ditetapkan oleh KPU dan itu menang, Oktober dia dilantik,” ucap Ganjar.

“Berikan mereka kesempatan untuk memerintah dan kita bisa memberikan dukungan dengan cara macam-macam, yang baik. Kita dukung, yang tidak baik kita kritik dan yang berkuasa kalau dikritik telinganya enggak boleh tipis, karena itu kecintaan kita pada Republik,” tegasnya.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi mengajukan gugatan PHPU ke MK pada Sabtu, 23 Maret 2024. Pengajuan itu tertuang dalam Nomor 02-03/AP3-Pres/PAN.MK/03/2024.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, berterima kasih kepada MK yang sudah menerima pendaftaran yang sudah dilakukan oleh TPN Ganjar-Mahfud. Menurut dia, masih ada bukti-bukti yang belum diajukan oleh TPN Ganjar-Mahfud.

Ia menyebutkan, permohonan yang diajukan oleh TPN Ganjar-Mahfud cukup tebal. Tebalnya disebut mencapai 150 halaman. Namun, itu belum termasuk bukti-bukti dan lampiran yang lain.

Todung mengatakan beberapa poin dalam permohonan gugatan yang dilayangkan ke MK. Melalui permohonan itu, TPN Ganjar-Mahfud meminta kepada MK agar pasangan Prabowo-Gibran diskualifikasi. Pasalnya, pasangan calon dengan nomor urut 2 itu melanggar ketentuan hukum dan etika saat proses pendaftaran.

“Itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MKMK, dan terakhir oleh DKPP,” kata dia.

Todung menambahkan, setelah ada pendiskualifikan terhadap pasangan Prabowo-Gibran, TPN Ganjar-Mahfud juga

menginginkan diadakannya pemungutan suara ulang (PSU). PSU itu bukan hanya dilakukan di satu atau dua tempat pemungutan suara (TPS), melainkan di seluruh TPS di Indonesia.

Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud meminta kepada MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. “Dan memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan PSU seperti yang kami minta,” kata dia.

Todung juga mengatakan, pemilu merupakan momen yang sangat menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pelaksanaan pemilu 2024 dinilai tidak demokratis, karena adanya pasangan calon yang melanggar konstitusi.

“Kita lihat asal muasal ini adalah nepotisme. Sekali lagi nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi,” kata dia.

Menurut Todung, nepotisme itulah yang menjadi inti persoalan yang saat ini dihadapi negara ini. Menurutnya, nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi yang begitu banyak.

Ia menyebutkan, salah satu ramifikasi dari nepotisme itu adalah keluarnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, ada pula putusan MKMK dan DKPP yang terkait dengan putusan MK tersebut.

“Nah ramifikasi yang lain apa? intervensi kekuasaan. Kemudian politisi bansos. Itu ratimikasinya. Dan, kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak yang kita saksikan di banyak tempat,” ujar Todung.

Ia mengatakan, pihaknya telah mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan Ganjar-Mahfud ke berbagai daerah. Dalam kegiatan kampanye itu, ia mengaku bertemu dengan kepala desa, lurah, hingga aktivis, yang menjadi korban kriminalisasi dan intimidasi.

Todung menilai, hal itu hanya sebagian dari poin dalam permohonan TPN Ganjar-Mahfud kepada MK. Di luar itu, masih ada masalah penyalahgunaan sistem IT KPU yang dinilai tidak bisa diterima.

“Sirekap salah satu contoh, dan kami sudah bertemu dengan banyak pihak yang mengatakan banyak sekali masalah dengan Sirekap. Dan penggelembungan suara itu bisa terjadi di sana. Ada lagi masalah DPT bermasalah” kata dia.

Menurut Todung, saat ini masalah tersebut sudah semua disampaikan kepada MK. Karena itu, ia berharap MK dapat menjaga konstitusi untuk menegakkan demokrasi.

“Dan, MK diuji apakah dia akan bertahan sebagai Mahkamah Konstitusi atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Saya kira, kepada MK untuk membuktikan dirinya di panggung sejarah Indonesia,” kata dia. ●RDO





EDY NATAR AKAN “BERCERAI” DENGAN SYAMSUAR

Meskipun masih beberapa waktu lagi, pembahasan mengenai siapa yang layak dan berpotensi untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2024 telah mulai muncul.

Pengamat komunikasi politik Riau, Aidil Haris menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di Riau akan menarik perhatian karena akan ada banyak figur baru yang siap bersaing merebut kursi Riau 1.

“Ada beberapa nama yang siap untuk maju dalam Pilgub Riau 2024, seperti Syamsuar, Edy Natar, Abdul Wahid, Zukri, dan Kasmarni,” ujar dosen Universitas Muhammadiyah Riau itu.

Selain kelima nama tersebut, Aidil juga memperkirakan bahwa kontestasi pemilihan kepala daerah akan semakin ramai dengan kemungkinan Alfedri, Achmad, Syahrul Aidi, SF Hariyanto, hingga Septina Primawati Rusli akan turut serta.

“Namun, dalam Pilkada nanti, Syamsuar, yang merupakan mantan gubernur, akan menghadapi perlawanan sengit dari Abdul Wahid. Terlebih lagi, dari dinamika politik bela-

kangan ini, ada peluang Wahid akan berpasangan dengan Kasmarni,” kata Aidil.

Aidil menjelaskan bahwa jika Abdul Wahid berpasangan dengan Kasmarni, pasangan ini memiliki potensi besar untuk memenangkan kontestasi. Wahid dianggap mewakili figur muda yang mampu bersuara di tingkat nasional, sementara Kasmarni mewakili suara perempuan dan masyarakat pesisir.

Aidil memperkirakan bahwa Edy Natar Nasution akan berpisah dengan Syamsuar dan siap menjadi penantang bagi ketua Golkar tersebut.

“Menurut saya, hubungan antara keduanya (Syamsuar dan Edy Natar) sulit untuk disatukan kembali,” jelasnya.

Sosok Edy Natar Nasution yang disorot berpotensi untuk memimpin Riau lagi setelah masa jabatan Gubernur definitifnya berakhir belum lama ini.

Ditambahkan pengamat politik Riau, Fauzi Kadir mengungkapkan analisisnya dengan membuat simulasi plus-minus jika Edy Natar Nasution berpasangan dengan tiga tokoh berpengaruh di Riau.

Tiga tokoh tersebut adalah Kasmarni,

Syahrul Aidi Maazat dan Firdaus.

Dari perspektif sosial politik, kemungkinan pasangan calon pada Pilgub Riau 2024 antara Edy Natar Nasution berpasangan dengan Sahrul Aidi akan membawa kombinasi antara mantan gubernur (yang juga wakil gubernur sebelumnya) dan politisi yang memiliki pengalaman dalam bidang legislatif.

“Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemilih yang menginginkan pemimpin dengan kualitas kepemimpinan dan keahlian politik,” ungkap Fauzi Kadir.

Pasangan ini dapat mendapatkan dukungan kuat dari basis massa PKS di Riau yang dapat menjadi kekuatan politik. Sahrul Aidi memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI dua periode, hal ini dapat memberikan insight dan koneksi politik yang baik.

“Hanya saja, PKS memiliki pandangan politik yang berbeda dengan partai Nasdem, hal ini dapat menimbulkan konflik internal dan sulit untuk menyatukan visi dan misi dalam memimpin provinsi,” bebernya.

Sementara jika Edy Natar berpasangan dengan Kasmarni, maka akan muncul dinamika politik yang menarik karena kolaborasi antara mantan gubernur dan bupati yang memiliki basis suara kuat di daerahnya.

Kasmarni, yang mendapat dukungan dari beberapa partai, juga dapat membawa keberagaman pandangan politik ke dalam pasangan tersebut.

Dari perspektif geopolitik, potensi kerjasama antara tokoh dari partai yang berbeda seperti Nasdem dan PKS dapat mencerminkan kerja sama lintas partai untuk mencapai kemenangan.

“Hal ini juga bisa menjadi sinyal bagi perkembangan politik di tingkat nasional karena menunjukkan bahwa partai-partai memiliki ketertarikan untuk bekerja sama dalam konteks lokal,” jelasnya.

Dalam aspek lainnya, baik calon pasangan antara Edy Natar dengan Sahrul Aidi maupun dengan Kasmarni, kedua pasangan memiliki latar belakang dan basis dukungan tersendiri yang bisa menjadi faktor penentu dalam kontestasi Pilkada.

“Pemilih di Riau harus mempertimbangkan secara matang visi, program, dan kemampuan kedua calon pasangan untuk memimpin provinsi dengan efektif dan bertanggung jawab,” urai Fauzi.

Dari perspektif sosial politik dan geopolitik, berikut adalah analisis plus-minus kemungkinan pasangan calon pada Pilkada Gubernur Riau 2024:

Namun, jika Edy Natar Nasution dipasangkan dengan Firdaus MT, memiliki pengalaman sebagai walikota Pekanbaru selama dua periode, ini bisa menjadi nilai tambah dalam memimpin provinsi Riau yang lebih luas.

Kombinasi antara Nasdem dan Demokrat dapat memberikan dukungan dari kedua partai yang berbeda sehingga dapat menarik pemilih dari berbagai latar belakang politik.

Firdaus MT memiliki basis dukungan yang kuat di Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, hal ini dapat menambah kekuatan pasangan tersebut.

Hanya saja, keduanya berasal dari partai yang berbeda, hal ini bisa menimbulkan perbedaan pandangan dalam hal kebijakan dan strategi politik, yang mungkin menimbulkan konflik di kemudian hari.

“Firdaus MT sebagai mantan walikota juga memiliki catatan kinerja dan kebijakan yang bisa menjadi bahan kritik dan perbandingan bagi lawan politiknya,” ulasnya.

Kombinasi antara dua tokoh yang masing-masing memiliki basis dukungan dan pengalaman yang kuat juga bisa menimbulkan persaingan internal di dalam pasangan tersebut.

“Secara keseluruhan, pasangan Edy Natar dengan Firdaus MT memiliki potensi yang kuat namun juga mengandung risiko tertentu. Penting bagi keduanya untuk saling mengkomodasi dan berkolaborasi dalam rangka memenangkan Pilkada Gubernur Riau 2024 dan memimpin provinsi dengan baik,” tutup Fauzi Kadir.

IRY





“Sudah pasti kami akan mencalonkan kembali Pak Ansar sebagai Gubernur Kepri dan Roby sebagai Bupati Bintan”

Asmin Patros

INFO PILKADA

Minggu IV • Maret 2024

7

DINASTI POLITIK MAKIN MERAJALELA

Wali Kota Batam yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi Calon Gubernur (Cagub) Kepulauan Riau (Kepri) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.

Muhammad Rudi mengaku siap maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri 2024, sejak dulu.

“Saya sudah siap dari dulu sampai hari ini maju ke gubernur, kan tidak ada pilihan,” ujar Rudi.

Rudi dengan tegas menyatakan tekadnya untuk terlibat dalam persaingan untuk mendapatkan ‘tahta’ gubernur Kepri.

“Insyaallah akan maju, sebagai manusia yang beriman, kita serahkan segalanya kepada Allah SWT,” katanya.

Soal sosok pendamping Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kepri ini menyatakan bahwa belum ada kepastian.

“Untuk wakil gubernurnya masih belum,” tambahnya.

Keputusan Rudi ini menarik perhatian banyak pihak, peneliti Lembaga Studi Pemilu dan Politik (LSPP), Sheviana Parmitha mengungkapkan, jika Rudi resmi maju, ia memiliki peluang besar untuk mengalahkan petahana saat ini, Ansar Ahmad, yang juga akan ikut dalam kontestasi tersebut.

Sheviana menilai bahwa Rudi memiliki sejumlah modal yang kuat untuk dapat mengungguli Ansar dalam Pilgub Kepri 2024 mendatang.

Salah satu modal utama yang dimiliki oleh M Rudi adalah kesuksesannya dalam memimpin Batam selama dua periode. Di bawah kepemimpinannya, Batam berhasil menjadi pusat ekonomi dan pariwisata yang maju.

“Banyak pihak mengakui bahwa Batam telah berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Sebelum kepemimpinannya, Batam menghadapi berbagai masalah seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat dan infrastruktur yang kurang memadai. Namun, Rudi berhasil mengatasi tantangan-

tantangan tersebut dan menjadikan Batam sebagai ‘Bandar Dunia yang Madani,’” ujar Sheviana.

Menurut Sheviana, kesuksesan Rudi dalam memimpin Batam juga membuat warga Kepri secara umum berharap daerahnya bisa maju seperti Batam.

Hal ini menjadi alasan mengapa dukungan untuk Rudi tidak hanya datang dari warga Batam, tetapi juga dari seluruh wilayah Kepri.

“Warga Batam pasti akan solid mendukung Rudi karena telah terbukti sukses selama memimpin kota ini. Sementara itu, warga dari daerah lain juga berharap agar daerah mereka bisa berkembang seperti Batam. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka akan mendukung Rudi dengan antusias,” jelasnya.

Selain itu, Rudi juga dinilai memiliki potensi untuk mengalahkan petahana, terutama karena Ansar akan kehilangan separuh dukungannya setelah kabar bahwa kemungkinan besar tidak akan berpasangan dengan Marlin Agustina, istri dari Rudi, yang juga akan maju sebagai Calon Walikota Batam.

“Sebagaimana biasanya, petahana akan dijagokan untuk menang. Namun, jika Ansar tidak berpasangan dengan Marlin, kekuatannya akan menurun. Pada Pilkada 2020 lalu,

Marlin telah membawa suara yang signifikan. Dengan penurunan dukungan untuk Ansar, kemungkinan besar Rudi akan mengambil alih posisi nomor satu di Kepri,” tambah Sheviana.

Sementara, DPD Partai Golkar Provinsi Kepri, memastikan akan kembali mengusung Ansar Ahmad sebagai cagub Kepri 2024.

“Sudah pasti kami akan mencalonkan kembali Pak Ansar sebagai Gubernur Kepri dan Roby sebagai Bupati Bintan,” ujar Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Kepri, Asmin Patros.

Sejauh ini kata dia, menjelang masa pendaftaran calon kepala daerah pada Agustus 2024 mendatang, Partai Golkar semakin intens menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol) untuk menjajaki koalisi di Pilkada Serentak 2024.

“Memang secara khusus rapat tentang pilkada itu belum. Tapi komunikasi politik itu terus berjalan,” sebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapil) DPD Partai Golkar Provinsi Kepri ini.

Ketika disinggung apakah ada kemungkinan untuk di Pilgub Kepri 2024 mendatang, peta koalisi Golkar akan sama persis dengan koalisi pada Pilpres di Pemilu 2024 lalu. Asmin menampilkan hal tersebut.

Namun, ketika disebut apakah ada kemungkinan Golkar nantinya akan berkoalisi dengan Gerindra di Pilgub Kepri 2024. Asmin, menyebut hal itu bisa saja terjadi.

“Oh, itu tentu akan sangat mungkin,” ucapnya.

Sedangkan, Analisis Politik Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim, mengatakan bahwa fenomena dinasti politik masih menjadi perhatian menjelang Pilkada 2024 di Provinsi Kepulauan Riau.

Menurutnya, dinasti politik semakin meluas dalam 10 tahun terakhir, dari tingkat nasional hingga daerah.

Zamzami menjelaskan bahwa fenomena ini semakin merajalela, dengan kecenderungan untuk terus diwariskan, yang sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Ia menyebutkan bahwa salah satu agenda reformasi adalah melawan segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN).

“Nepotisme adalah mendukung atau memberi prioritas kepada keluarga dalam keputusan politik. Dinasti politik di Kepulauan Riau, khususnya di Ansar dan Rudi, sangat jelas terlihat,” ungkapnya.

Zamzami melanjutkan bahwa efek dari fenomena ini adalah menutup peluang bagi kader-kader partai politik lain untuk berkiper dalam arena politik.

“Hal ini akan membatasi kemampuan partai politik untuk memajukan kader-kader alternatif, karena dominasi figur dari keluarga tertentu,” katanya.

Menurut Zamzami, calon-calon yang muncul di bursa Pilkada saat ini cenderung merupakan orang-orang yang berasal dari keluarga politik yang sudah memiliki pengaruh kuat dalam dunia politik.

“Calon Gubernur yang muncul saat ini hampir selalu dari lingkungan yang sama, dan ini membuat masyarakat terbiasa dengan pola ini, yang jelas menguntungkan bagi keluarga terkait,” jelasnya. ●IRY





KEGAGALAN PROGRAM UNGGULAN

DPP Partai Golkar telah mengumumkan bahwa Anggota DPR RI Hanan A Rozak telah dipilih untuk menjadi bakal Calon Gubernur (Cagub) Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan datang.

Keputusan ini diambil setelah serangkaian pertimbangan dan evaluasi yang matang terhadap potensi dan komitmen Hanan A Rozak, yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPR.

Penunjukan resmi Hanan A Rozak sebagai calon gubernur tercatat dalam Surat Perintah DPP Partai Golkar Nomor Sprint-1370/DPP/GOLKAR/XI/2023, yang dikeluarkan pada 20 November 2023.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ismet Roni, mengungkapkan bahwa mereka belum menerima tembusan surat perintah tersebut dari DPP Partai Golkar.

“Namun secara resmi, kami DPD Partai Golkar Provinsi Lampung belum pernah menerima atau mendapatkan tembusan surat perintah tersebut dari DPP Partai Golkar,” kata Ismet Roni.

Hanan A Rozak bukanlah sosok yang asing di kalangan masyarakat Lampung.

“Rozak, yang dikenal sebagai sosok yang berdedikasi

tinggi dan memiliki visi yang jelas untuk kemajuan Lampung, telah terbukti memiliki kompetensi dan pengalaman yang mengesankan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur,” bebernya

Dengan latar belakang pendidikan di bidang pertanian dan pengalaman memimpin Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Rozak memiliki wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah Lampung yang sangat bergantung pada sektor pertanian.

Prestasinya sebagai pejabat Bupati Tulang Bawang Barat dan Plt Sekretaris DPRD Provinsi Lampung juga menunjukkan kapasitasnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat

Lampung.

“Di luar dunia politik dan pemerintahan, Rozak juga aktif dalam kegiatan sosial dan kepemudaan di Lampung,” tambahnya.

Rozak bahkan dianggap dapat disejajarkan dengan Arinal Djunaidi, petahana Gubernur Lampung saat ini. Hal ini berkaitan dengan program Kartu Petani Berjaya yang belum mampu memenuhi harapan masyarakat petani di Lampung.

Di sisi lain, upaya Rozak dalam memajukan sektor pertanian telah disambut baik oleh petani di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Salah satunya adalah pembangunan jalan usaha tani sepanjang 1 kilometer di Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penunjukan Hanan A Rozak sebagai Cagub Lampung diprediksi akan memperpanas persaingan dalam Pilkada 2024.

Rozak akan bersaing dengan petahana Arinal Djunaidi, yang juga tercantum dalam surat perintah DPP Partai Golkar Nomor Sprint-1369/Golkar/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024.

Munculnya pandangan bahwa Hanan A Rozak lebih mumpuni daripada petahana saat ini, Arinal Djunaidi.

Beberapa pihak telah menyampaikan pandangan mereka mengenai kedua kandidat ini. Sebagai informasi, DPP Partai Golkar secara resmi mengumumkan Hanan A Rozak sebagai Cagub Lampung 2024.

Menurut Ketua DPP LSM Pematank, Suadi Romli Hanan menyebut A Rozak dinilai lebih mumpuni ketimbang Arinal Djunaidi sebagai petahana. Suadi menyebutkan bahwa kegagalan program Kartu Petani Berjaya, yang menjadi

andalan Arinal Djunaidi, menjadi salah satu faktor penilaian tersebut.

Program ini belum mampu memenuhi harapan masyarakat petani Lampung dalam mencapai kesejahteraan, terutama di tengah konflik agraria yang masih berlangsung.

“Program Pemprov itu masih jauh dari harapan masyarakat petani Lampung. Saya tidak melihat sejauh mana progres program Kartu Petani Berjaya,” ujar Suadi.

Pengacara Rakyat, Wahrul Fauzi Silalahi, juga mengkritik komitmen program unggulan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, terkait Kartu Petani Berjaya. Dia mempertanyakan keberlangsungan program tersebut dalam menghadapi masalah banjir dan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani Lampung.

Wahrul menyoroti kesulitan petani Lampung dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, terutama di daerah-daerah yang terdampak banjir seperti Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Barat, Mesuji, dan Tulang Bawang.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan akan realisasi program Kartu Petani Berjaya selama kurang lebih 4 tahun terakhir,” tambahnya.

Mengenai Hanan A Rozak, sebagai salah satu kandidat kuat dalam Pilgub Lampung, dia menawarkan rekam jejak dan pengalaman yang luas dalam bidang pemerintahan dan pertanian.

Latar belakang pendidikan dan pekerjaan Rozak di sektor pertanian, dipadu dengan pengalaman administratifnya, memposisikannya sebagai figur yang mengerti kebutuhan dan potensi sektor ini di Provinsi Lampung.

Kepemimpinan Rozak di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, serta pengalaman sebagai Bupati Tulang Bawang, memberinya wawasan mendalam tentang tantangan dan solusi untuk pembangunan daerah, terutama dalam aspek pertanian dan pengembangan masyarakat.

Jabatannya sebagai pejabat Bupati Tulang Bawang Barat dan pengalaman sebagai Plt Sekretaris DPRD Provinsi Lampung juga menunjukkan kemampuannya dalam berbagai kapasitas administratif dan legislatif.

Rozak juga aktif dalam organisasi, termasuk perannya di Partai Golkar, yang menambah dimensi strategis dalam perjalanan politiknya.

Kegiatannya di DPD Golkar Provinsi Lampung, baik sebagai Wakil Ketua Korbid Kajian Strategis dan Pengembangan SDM maupun dalam berbagai peran lainnya, mencerminkan komitmen dan pengaruhnya dalam perumusan kebijakan dan strategi partai.

Hanan A Rozak saat ini adalah anggota DPR RI terpilih dari Dapil Lampung II pada Pemilu 2019 dan 2024.





“Agung Firman Sampurna dan Fauzi Amro adalah dua figur yang punya kans kuat dalam skema elektoral pilgub ke depan”

Haekal Al Hafafah

INFO PILKADA

Minggu IV • Maret 2024

9

DUET LINTAS PARTAI DI PILGUB SUMSEL

Meski belum ada keputusan resmi dari setiap partai politik siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung di Pilgub Sumsel pada Pilkada serentak namun beberapa nama mulai muncul.

Bukan hanya Mawardi Yahya dan Herman Deru saja yang akan saling berkompetisi, ada juga Agung Firman Sampurna dan Fauzi Amro ikut meramaikan persaingan.

Duet lintas partai antara Agung Firman Saputra dari Partai Golkar dan Fauzi Amro dari Partai Nasdem menjadi salah satu pasangan ideal untuk menaklukkan Mawardi Yahya dan Harnojoyo serta Herman Deru yang akan berpasangan dengan Lury Alex Noerdin di Pilgub Sumsel.

Agung - Fauzi akan memberi kejutan di Pilkada serentak nanti

Pengamat politik Sumatera-Selatan M. Haekal Al-Haffafah menilai nama Agung Firman Sampurna dan Fauzi Amro berpeluang jadi kuda hitam di Pilgub Sumsel.

Keduanya adalah figur yang punya basis massa cukup kuat di Pilkada serentak nanti untuk mengalahkan Mawardi Yahya dan Herman Deru.

“Agung Firman Sampurna dan Fauzi Amro adalah dua figur yang punya kans kuat dalam skema elektoral pilgub kedepan” Ungkap Haekal.

Menurut Haekal, jika keduanya bergabung bandul politik bisa bergeser. Dimana sebagian dukungan kelas menengah bisa berubah, pertarungan antar jejaring elit dalam perebu-

tan perahu parpol dilevel nasional juga akan sengit.

“Angka perolehan suara yang diraih Fauzi Amro dalam Pileg lalu mencapai 281.499 adalah top tertinggi nasional dan bukan perolehan suara yang bisa dianggap sepele. Perlu diingat pilgub Sumsel butuh kerja total itu yang dilakukan Fauzi Amro” jelas Pengajar Ilmu Politik Unsri tersebut.

Haekal menyebutkan, sampai sekarang belum ada partai menyatakan dukungan secara resmi siapa-siapa yang akan diusung dalam pilgub Sumsel.

“Orang lupa proses penjaringan bakal calon gubernur belum dimulai, artinya proses masih panjang, Belanda masih jauh, nama yang beredar hari ini masih punya potensi gagal mendapat dukungan partai,” jelas Direktur Litbang IKA FISIP Unsri ini.

Dalam politik elektabilitas itu satu faktor, faktor lain adalah peta konflik politik serta peluang terjadinya konsensus baru dilevel elit terutama dinamika dan perubahan pasca pileg-pilpres juga harus dihitung.

“Kita bisa lihat partai mana yang hari jadi pemenang legislatif, isinya siapa, yang berpotensi tersingkir

siapa anomali itu sangat mungkin terjadi dalam pilgub Sumsel,” tegas Haekal.

Agung Firman Sampurna adalah tokoh Sumsel yang sudah lama berkiprah di nasional, pengalamannya sebagai Ketua BPK RI, secara keilmuan dan pengalaman lebih dari cukup untuk kembali berkontribusi di Sumatera-Selatan.

“Tiga kali pilgub Sumsel, Golkar selalu punya calon boleh jadi kejutan politik itu Agung Firman Sampurna. Sementara Fauzi Amro adalah Caleg dengan perolehan suara Nasdem terbanyak Nasional. Belum lagi hasil dan dinamika pileg-pilpres akan berpengaruh bagi munculnya skema nama baru dalam pilgub sumsel,” tutur Haekal.

Bahkan tidak mungkin Partai Nasdem akan lebih memilih Fauzi Amro daripada Herman Deru. Sehingga HD terancam terdepak dari Partai Nasdem.

Bahkan, sebelumnya beredar kabar bahwa Herman Deru terancam gagal maju dalam Pilgub Sumsel 2024 pasca ditinggal Mawardi Yahya.

Pasalnya, Partai NasDem belum secara tegas menetapkan Herman Deru se-

bagai Cagub Sumsel yang akan diusung dalam Pilgub 2024.

Meskipun Deru baru saja menjabat sebagai Gubernur Sumsel dari 2018 hingga 2023 bersama Mawardi Yahya.

Keputusan belum menetapkan Herman Deru sebagai cagub oleh Partai NasDem disebut-sebut karena kurang mendukung sepenuhnya Anies-Muhaimin (AMIN) pada Pilpres 2024.

Padahal Herman Deru, mantan Bupati Ogan Komering Ulu Timur selama dua periode, juga menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sumsel. Namun, kehadirannya tidak terlihat dalam kampanye akbar Anies Baswedan di Benteng Kuto Besak (BKB), Kota Palembang.

“Sejumlah kampanye akbar Anies, Herman Deru terkesan enggan terlibat secara langsung. Sikap politik Deru ini menjadi sorotan serius di internal Nasdem,” tambah Haekal.

Dampaknya, perolehan suara pasangan AMIN di Sumsel jauh tertinggal, bahkan di bawah target TPD AMIN.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Sumatera III, Fauzi Amro, dengan tegas menyatakan bahwa sosok yang akan diusung NasDem dalam Pilgub Sumsel akan dipilih berdasarkan mekanisme partai.

Fauzi menambahkan bahwa partai tidak akan segera menunjuk Deru sebagai Cagub NasDem meskipun Deru terakhir kali menjabat sebagai gubernur.

Meski begitu, Fauzi membantah adanya konflik antara NasDem dan Deru.

“Tidak, kami tidak ada konflik. Namun, prosesnya adalah melalui survei. Jika suara Deru tertinggi, kami akan mencoba mendukungnya. Namun, saat ini belum ada kepastian,” ujarnya.

Menurutnya, proses penjaringan tersebut bertujuan untuk melihat potensi tokoh dari Sumsel yang dapat bersaing dalam Pilgub. Tidak menutup kemungkinan bagi tokoh nasional yang ingin turut serta memajukan Sumsel.

“Proses penjaringan akan dilakukan, survei internal akan dilakukan terlebih dahulu. Tokoh dengan hasil survei tertinggi akan kami pilih, intinya kami ingin mengajukan calon yang bisa menang,” tambahnya. ●IRY





PREDIKSI TIGA PASANG CAWAKO PALEMBANG

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palembang 2024 memang belum berjalan. Namun, banyaknya kandidat yang menyatakan siap maju mulai ramai diperbincangkan.

Pengamat politik menyebut, Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Palembang akan diikuti oleh tiga pasang kontestan Cawako dan Cawawako periode 2024-2029.

Bahkan ada dua nama pertahanan memiliki elektabilitas tinggi di Palembang disinyalir kuat bakal terjun ke panggung kompetisi Pilwako yaitu Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan mantan Wawako Palembang Fitrianti Agustinda.

Hanya saja, hingga saat ini keduanya belum menyatakan secara resmi pencalonan dirinya kepada publik.

Kemudian nama Ketua Komisi IV DPRD Palembang telah menjabat dua periode Syafran Syaropi muncul ke publik menyatakan menjadi penantang di Pilwako mengusung jargon “Upgrading Palembang”.

Lalu pasangan Charma Afriyanto dan Novembriono (Boy) menjadi pasangan pertama mendeklarasikan maju dengan jalur independen Pilwako 2024.

Charma jauh-jauh hari pun sudah dikenal masyarakat Palembang sebagai calon Wali Kota dengan intens turun ke akar rumput memperkenalkan dirinya secara pribadi.

Kemudian nama H Nasrun Umar atau HNU juga dari dulu telah memasang spanduk di seluruh Palembang akan maju di Pilwako dari pantai PAN tiba-tiba

batal dicalonkan.

Dikabarkan HNU dinilai tidak mampu mendongkrak suara PAN. Terbukti kursi PAN di DPRD Palembang berkurang serta Achmad Hafisz Tohir gagal duduk kembali di DPR RI.

Selanjutnya banyak nama-nama lain yang diam-diam disinyalir akan menjadi kuda hitam di Pilwako seperti Andi Asmara, Prima Salam, Basyaruddin Ahmad, Yudha Mahyudin dan Syaiful Fadli.

Pengamat politik Sumatera Selatan (Sumsel) DD Shineba mengatakan dari banyak calon yang disinyalir bermunculan diprediksikan hanya akan diikuti oleh tiga kontestan saja di Pilwako nantinya.

“Paling tiga pasang yang akan ikut itu juga ideal dengan komposisi pemenang Pileg hari ini. Kalau untuk partai yang diusung oleh tiga kontestan itu saya yakin juga bercampur-campur walaupun koalisi Pilpres tetap menjadi modal dasar untuk berkomunikasi,”kata dia

Menurut Ketua Persaudaraan 98 ini, menilai Ratu Dewa paling menguasai panggung kompetisi berdasarkan survei kekuatan elektabilitas dampak dari sekarang masih menjabat sebagai Pj Walikota Palembang.

Kekuatan elektoral Ratu Dewa bahkan lebih kuat dibandingkan mantan Wawako Palembang Fitrianti Agustinda atau Finda yang juga memiliki elektoral sendiri di Palembang.

“Elektabilitas Ratu Dewa sangat tinggi se-

bagai pertahanan masih bertemu dengan warga Palembang menjabat sebagai Pj wali kota. Namun politik itu sifatnya dinamis tidak bisa kita tebak siapa saja nantinya dari ketiga prediksi siapa yang maju. Sebab bisa saja Ratu Dewa tidak akan mencalonkan diri karena pertimbangan pribadinya,”jelasnya.

Dia menilai sosok pemimpin Indonesia harus mengetahui substansi Kota empek-empek di mata nasional dan internasional.

Terlebih lagi Palembang sudah dikenal dikancah internasional melalui fasilitas pembangunan di bidang olahraga dengan hadirnya kompleks olahraga Jakabaring Sport City (JSC) di kawasan Jakabaring.

“Palembang ini harus dipimpin orang yang memiliki visi yang kuat untuk membangun Palembang karena suka tidak suka adalah Kota Metropolitan. Jadi harus paham pembangunan untuk terus memperbesar Palembang, namun pembangunan tidak merampas hak masyarakat. Jangan lagi masyarakat terpengaruh dengan jargon,”pungkasnya

Pengamat Politik Sumsel Haekal Al-Haffafah dari Lembaga Kajian Politik Teras Indonesia juga mengatakan hal yang serupa diprediksikan hanya berjumlah tiga kontestan sebanyak-banyaknya nama muncul kepermukaan tetap kontestan tidak akan membeludak menjadi banyak.

“Calon kontestan di Pilwako saya prediksi lebih dari dua sekitar tiga atau empat kontestan apa lagi akan ada calon independen tetapi tidak lebih dari itu,”jelasnya

Dilanjutkannya faktor elektabilitas sangat penting sebagai langkah utama untuk melakukan seleksi akhir nantinya. Kendati munculnya nama baru tetap saja perhitungan kemenangan dari popularitas calon itu bisa maju atau tidak ditentukan nasibnya.

“Namun kita lihat lagi dari faktor elektabilitas itu yang akan menyeleksi bisa memperkuat atau melemahkan para nama-nama yang sudah muncul untuk di calonkan,”tuturnya

Munculnya secara perdana nama pasangan Charma Afriyanto dan Novembriono (Boy) Pilwako jalur independen dicermati oleh Haekal Al-Haffafah.

Dia menyebutkan apabila pasangan independen akan benar-benar maju bisa saja menjadi sejarah baru untuk Pilwako Palembang.

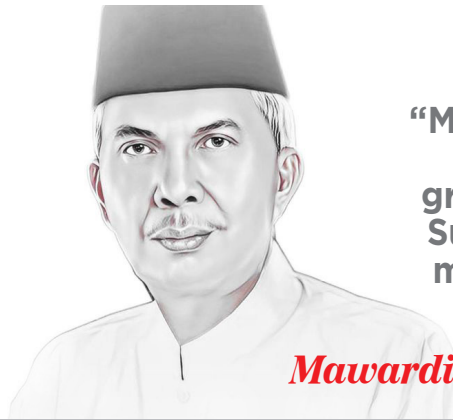
“Sepanjang sejarah tidak ada calon independen menang di Pilwako Palembang apabila menang ini menjadi sejarah baru. Walaupun masyarakat semisalnya gerah dan tidak suka dengan partai politik tidak akan membuat calon independen juga menang,”ucapnya

Disisi lain dia juga mencermati gelora antusias Pilwako di Palembang tidak akan besar seperti di Pilpres kemarin. Karena dukungan media sosial (Medsos) secara nasional membuat antusias masyarakat Palembang dari semua kalangan khususnya kaum Gen Z dan milenial ikut heboh.

“Kalau antusiasisme Gen Z dan Milenia tidak akan seheboh Pilpres. Saya rasa Pilwako berjalan semarak tetapi tidak seheboh Pilpres karena levelnya juga nasional,”pungkasnya.

•IRY





“Maka dari itu, salah satu caranya untuk memastikan bahwa program-program bisa terlaksana di Sumsel, saya memutuskan untuk maju sebagai Gubernur Sumsel”

Mawardi Yahya

INFO PILKADA

Minggu IV • Maret 2024

11

PERSAINGAN PILGUB SUMSEL RASA PILPRES

Petahana Herman Deru dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024, kini harus berhadapan dengan lawan-lawan yang sengit.

Setelah ditinggal Mawardi Yahya yang mendeklarasikan diri maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumsel bersama Harnojoyo, mantan Wali Kota Palembang, kini muncul nama Ridho Yahya yang digadang akan ikut berpartisipasi.

Namun, kebenaran majunya Ridho Yahya dalam kontestasi Pilgub Sumsel 2024 belum bisa dipastikan kebenarannya.

Nama Ridho Yahya yang merupakan adik kandung Mawardi Yahya ini mulai ramai diperbincangkan di media sosial sebagai menantang Herman Deru.

Herman Deru sendiri santer dikabarkan bakal berpasangan dengan mantan Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad atau dengan mantan Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe.

Kemudian Bupati PALI Heri Amalindo juga disebut bakal berpasangan dengan Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo.

Joncik yang mantan Ketua Komisi II DPRD Sumsel ketika dikonfirmasi tidak menampik kabar tersebut.

“Prinsipnya itu kalau partai menugaskan, siap,” tegas pria yang akrab di tingkat naman-nya JM.

Pengamat Politik Bagindo Togar menyebut kemungkinan bakal majunya dua tokoh dari PAN Joncik Muhammad dan Partai Golkar Bobby AR di Pilgub Sumsel, Rabu 27 November 2024 mendatang.

Kalau melihat koalisi nasional, bagaimana nasib Golkar dan PAN. Ada partai besar Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN. Sedangkan itu leadernya adalah Golkar. Baru diikuti Gerindra.

Persaingan Pilgub Sumsel ini, jelasnya sangat sengit dan menarik. Sehingga Pilgub ini rasa Pilpres.

“Nah apa sekarang semua itu karena Golkar memberikan mereka kan daftar tertinggi 12 kursi. PAN 6 kursi. Apakah mereka tidak mempergunakan hak politik mereka dalam Pilgub Sumsel. Gak mungkin kan?,” ujar Bagindo.

Dan ini menurutnya masih terbuka kalau mereka tidak mengindahkan atau mengenyampingkan Koalisi Nasional, maka perpaduan ini rentan.

Satu, rentan secara definitif untuk dijadikan sebagai pasangan harus direkomendasikan dan rentan juga untuk memperoleh keunggulan.

“Tidak heran nanti akan muncul perpaduan tokoh yang dimunculkan siapa itu apakah Bobby dengan Joncik yang sudah menayangkan flyer. Total 18 kursi. Syaratnya 15 kursi terpenuhi,” kata Bagindo.

Menurut Bagindo, apakah duet Mawardi Yahya-Harnojoyo (MaHar) akan awet bertahan, hingga resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumsel Agustus nanti, sebagai peserta Pilkada masih menjadi tanda tanya.

“Sebab, semua masih harus menunggu proses dan keputusan politik resmi, dari Parpol pengusung maupun pendukung,” kata Bagindo.

Dalam upaya untuk memenangkan pertarungan di Pilgub 2024, M a -

wardi Yahya memiliki langkah-langkah politik yang sudah disiapkan.

Salah satu strategi yang akan dijalankan oleh Mawardi untuk meraih kemenangan adalah dengan beradaptasi dengan masyarakat secara luas, melakukan sosialisasi, dan memberikan pemahaman yang baik, karena baginya politik sejatinya adalah seperti sedekah.

“Kita penuh pas dalam menyusun panitia menjelang hari H, dan kita juga penuh pas setelah hari H berakhir,” ungkap Mawardi.

Sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Sumatera Selatan, Mawardi merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program-program yang diusung oleh pasangan calon nomor dua ini bisa terwujud di Sumsel.

“Maka dari itu, salah satu caranya untuk memastikan bahwa program-program ini bisa terlaksana di Sumsel, saya memutuskan untuk maju sebagai Gubernur Sumsel,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai adiknya, Ridho Yahya, yang kabarnya juga akan maju dalam Pilgub Sumsel 2024, Mawardi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut. Namun, jika memang hal itu terjadi, ia tidak terlalu mempermasalahkannya.

“Jika ada dua pasang keluarga Yahya yang maju, itu tidak masalah. Bagi saya, siapapun yang menang adalah hal yang baik, saya tidak ingin membatasi, tetapi saya akan tetap maju,” tandasnya.

“Namun sebenarnya, apakah dia akan maju atau tidak, saya tidak tahu,” tambahnya.

Mawardi Yahya memutuskan untuk berpasangan dengan mantan Walikota Palembang, Harnojoyo, dalam Pilgub Sumsel 2024.

Keputusan ini tidak diambil begitu saja, karena pengalaman dan basis dukungan daerah menjadi alasan utama Mawardi memilih Harnojoyo.

Menurutnya, pasangan Mawardi-Harnojoyo adalah kombinasi yang tepat. Keduanya pernah menjabat sebagai ketua DPRD, walikota, dan bupati.

Dilihat dari rekam jejak dan latar belakang keduanya, Mawardi yakin bahwa keduanya mampu menyelesaikan masa jabatannya dengan baik tanpa ada masalah yang berarti.

“Mungkin berdasarkan wilayah, saya dari sini, dan Harnojoyo dari Lahat, Basemah, Musi Rawas di sini. Jadi wilayah-wilayah ini terwakili,” paparnya.

Selain itu, faktor partai yang sudah berkoalisi dan mendukung pasangan presiden nomor dua juga menjadi pertimbangan penting.

“Partai Demokrat dan Gerindra sudah bersatu di tingkat nasional, jadi ini diikuti di tingkat daerah. Selain itu, gaya kepemimpinan Harnojoyo yang sederhana dan konsisten selama menjabat walikota juga menjadi pertimbangan,” ungkap Mawardi.

Saat ini, setelah mendeklarasikan diri, foto-foto Mawardi Yahya dan Harnojoyo sudah tersebar luas di kota Palembang.

Mawardi menyatakan bahwa ia tidak menganggap enteng Pilgub Sumsel 2024 ini dan menyadari bahwa waktu menuju Pilgub Sumsel yang akan digelar pada bulan November nanti sangatlah singkat.

“Mungkin ada yang belum mendeklarasikan diri karena merasa enteng. Tapi bagi kita, kita harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu,” tegasnya. ● IRY



Mawardi Yahya



Ridho Yahya



Herman Deru

“Hak angket hanya untuk hak menyelidiki, apakah benar terjadi, kalau benar terus bagaimana, kan begitu. Kita bukan penyidik, kita penyelidik saja”

Junimart Girsang



USULAN HAK ANGKET KURANG GREGET

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR optimistis hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bakal berjalan di parlemen.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Yanuar Prihadin, mengklaim, beberapa fraksi partai politik yang belakangan digadang menolak, justru bakal mendukung hak angket itu digulirkan. Adapun fraksi partai politik di DPR yang menyuarakan menolak wacana hak angket adalah mereka yang mengukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Selain PDIP, PKB, PKS dan Nasdem, hak angket sangat terbuka untuk didukung oleh fraksi-fraksi lainnya di DPR. Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan pandangan tentang pentingnya hak angket untuk meluruskan simpang siur penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Yanuar, Selasa, 26 Maret 2024.

Yanuar mengungkapkan, pasca Pemilu 2024, setiap partai politik mulai menghitung eksistensinya masing-masing dalam pemerintahan yang baru. Diakui, semua partai politik punya kepentingan soal ini.

“Artinya, setiap parpol bisa mengambil sisi tertentu dari hak angket untuk kepentingannya masing-masing,” ujar Ketua DPP PKB ini.

Yanuar mengambil contoh Partai Gerindra yang sangat membutuhkan legitimasi yang lebih kuat untuk kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Mereka (Gerindra) tentu berkeinginan agar Prabowo Subianto bisa lebih kuat dan mandiri dalam mengambil keputusan sebagai presiden, tidak dibayang-bayangi oleh sosok Jokowi terus menerus,” ucap dia.

Yanuar juga menyoroti Partai Golkar yang dinilai bisa mengambil manfaat dari hak angket untuk kepentingan konsolidasi internal secara bebas. Menurut dia, dengan tambahan kursi DPR yang signifikan, dukungan Golkar kepada hak angket akan menambah daya tawarnya dalam bernegosiasi dengan Prabowo bahkan Jokowi.

“Begitu juga dengan Demokrat akan punya hitungannya sendiri jika akhirnya mendukung hak angket. Demokrat membutuhkan ‘power’ yang lebih kuat untuk lebih

diperhitungkan dalam konstelasi pasca pilpres. Apalagi PAN sangat membutuhkan suatu keadaan di mana partai ini ingin lebih bebas, mandiri dan leluasa dalam berkiprah ke depan,” terangnya.

Lebih jauh, Yanuar berpandangan bahwa semua kepentingan tersebut bisa diwadahi dalam hak angket. Apalagi, hampir semua partai politik punya kerisauan yang sama tentang mahalannya biaya politik dalam Pemilu 2024.

“Tentu saja semua parpol menaruh harapan agar ke depan sisi buruk Pemilu 2024 tidak berulang lagi. PPP pun kemungkinan tak mau kehilangan momentum dengan hak angket karena berharap gugatannya di MK bisa berhasil meloloskan partainya ke DPR agar tembus ambang batas parlemen 4 persen,” sambung Yanuar.

Maka dari itu, dia menilai hak angket akan menjadi titik temu untuk berbagai cara pandang dan bahkan kepentingan yang berbeda-beda dari setiap fraksi partai politik.

“Sehingga, boleh jadi hak angket bisa akan terkait juga dengan pileg, bukan sekadar pilpres. Dalam situasi ini mungkin saja akan ada kompromi antar fraksi soal pilihan isu yang akan diselidiki,” kata Yanuar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, menyebut rencana pengguliran hak angket kecurangan Pemilu 2024 terus dilakukan pembahasan antar sesama anggota DPR.

“Hak angket itu kan hak konstitusional DPR dan diatur dalam undang-undang. Nah, kalau disebut hak angket itu ya kita tunggu,” tegas Junimart di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

“Ini kan sedang dalam percakapan yang sedang bergulir di DPR, mengenai jadi tidaknya kita lihat

bagaimana komunikasi di antara lintas fraksi nanti, ya syaratnya itu kan cukup paling sedikit 25 orang dan cukup dua fraksi saja. aturannya kan begitu,” tambahnya.

Junimart mengingatkan kepada pemerintah agar hak angket tidak menjadi momok yang menakutkan. Pasalnya, hak angket merupakan hak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan kecurangan bukan untuk membatalkan Pemilu.

“Hak angket hanya untuk hak menyelidiki, apakah benar terjadi, kalau benar terus bagaimana, kan begitu. Kita bukan penyidik, kita penyelidik saja,” tegasnya.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap berikhtiar untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024, meski terjadi dinamika politik usai pengumuman hasil resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. PKS mengaku fokus mengawal sengketa pilpres dan pileg di MK, serta keukeuh soal pengguliran hak angket kecurangan Pemilu di DPR.

“Majelis Syura mengamanatkan kepada DPP PKS untuk fokus mengawal gugatan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi hingga tuntas,” kata Presiden PKS, Ahmad Syaikh, dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu, 23 Maret 2024.

Syaikh menyebut, dalam hal itu Tim Hukum PKS telah memberikan secara langsung data hasil penghitungan suara di seluruh provinsi dan luar negeri yang dibutuhkan untuk proses gugatan sengketa Pilpres di MK. Tak hanya sengketa pilpres, Tim Hukum PKS telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk pileg.

“Kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat memproses sengketa Pemilu secara jujur, adil, transparan, profesional, dan independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.

Syaikh menambahkan, Majelis Syura juga mengamanatkan kepada Fraksi PKS DPR untuk mendorong digulirkannya Hak Angket. Hal itu dinilai sebagai tanggung jawab moral serta penggunaan hak konstitusional anggota dewan di parlemen.

“Sebagai tanggung jawab moral dan hak konstitusional, PKS melalui Fraksi di DPR terus berupaya mendorong digulirkannya hak angket atas berbagai dugaan kecurangan selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024 dan adanya potensi pelanggaran terhadap Perundang-Undangan,” terangnya.

Di sisi lain, Peneliti Utama Politik pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Siti Zuhro, mempertanyakan komitmen parpol menggulirkan hak angket soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR. Padahal, kata Siti, dugaan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) telah didesain sedemikian rupa, sehingga merugikan parpol.

Siti menilai, hak angket cenderung belum ada kemajuan hingga hari ini karena ada keraguan di kalangan politikus. Jika nekat mengajukan hak angket, akan dibuka kasus hukum yang melekat pada politikus yang menggulirkan isu itu.

Siti menyampaikan, untuk mengungkap kecurangan TSM pada Pemilu 2024 harus dilakukan secara serentak melalui jalur politik (hak angket), jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

• RDO





“Ada lima (pj) kita lakukan penggantian dikarenakan ada inisiatifnya sendiri untuk ke arah pasangan tertentu”

Tito Karnavian

KLAIM PEMILU LANCAR ASN TIDAK NETRAL

Isu netralitas menjadi salah satu persoalan pada Pemilu 2024. Kementerian Dalam Negeri menerima laporan soal 450 aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar netralitasnya selama kontestasi nasional tersebut.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut, dari sejumlah itu, ada 240 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi. Kemudian, 180 ASN telah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dengan penjatuhan sanksi.

Selain itu, Tito mengaku juga menerima laporan ketidaknetralan pejabat kepala daerah. Terdapat sejumlah video yang diterima jajarannya yang menjadi bukti ketidaknetralan dan mereka yang melanggar sudah diberi sanksi.

“Ada lima (pj) kita lakukan penggantian dikarenakan ada inisiatifnya sendiri untuk ke arah pasangan tertentu. Tidak spesifik satu pasangan, tapi ada pasangan ini, pasangan ke sana, ada pasangan ke sini, kita berikan sanksi juga dengan penggantian,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2024.

Mantan Kapolri tersebut menjelaskan, terdapat 10 instansi ASN yang melakukan banyak pelanggaran terkait netralitas pada Pemilu 2024. Instansi tersebut adalah Kabupaten Kolaka, Kabupaten Majene, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Pinrang, serta Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Tengah.

Kemendagri juga mengelompokkan lima kategori pelanggaran para ASN. Pertama adalah membuat postingan, berkomentar, menyukai, dan bergabung di akun pemenang pasangan calon (15,8 persen). Kedua, ikut dalam kegiatan kampanye, sosialisasi, hingga pengenalan pasangan calon ataupun partai politik (12,9 persen). Ketiga, sosialisasi dan kampanyenya pasangan calon (11,3 persen).

Keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu 2024 (10,8 persen). Terakhir, menjadi anggota atau pengurus partai politik (7,1 persen).

Di sisi lain, Tito juga membeberkan

dukungan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Dia menegaskan, dukungan yang diberikan pemerintah tidak bermaksud untuk mengintervensi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, dukungan diberikan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mungkin dapat bekerja sendiri karena Indonesia merupakan negara besar dan kompleks.

Dukungan ini seperti menyediakan data kependudukan, misalnya Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Kemendagri juga memberikan hak akses terhadap data tersebut secara penuh kepada KPU. Selain itu, Kemendagri juga melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik agar data yang terkumpul lebih optimal.

“Kemudian pada saat pelaksanaan kampanye kita juga memberikan dukungan, selain TNI, Polri, juga ada Linmas di sana yang merupakan jejaring Pemda dan Satpol PP,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga membantu mempercepat distribusi logistik pemilu atas permintaan KPU. Bantuan distribusi ini terutama untuk daerah-daerah yang sulit diakses.

“Ada yang bahkan meminta dukungan karena kekurangan kendaraan operasional, ini juga dibantu oleh Pemda-Pemda dan kami meminta untuk membantu semaksimal mungkin,” ujarnya.

Dukungan lain yang diberikan yakni berkaitan dengan upaya menjaga netralitas ASN. Langkah ini seperti dengan menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri, MenPAN-RB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang ditetapkan pada 22 September 2022.

Kemendagri juga menerbitkan Surat Edaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kemendagri telah menerbitkan 14 Surat Edaran yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabu-

paten/kota untuk membantu penyelenggara pemilu dan pilkada di daerah.

Selain itu, Kemendagri juga proaktif memastikan anggaran Pemilu 2024 terpenuhi. Sebab, anggaran yang diajukan oleh KPU belum tentu langsung disetujui karena ada revisi atau reuvi lebih lanjut.

“Kami mendorong kepada Bapak Presiden, Menkeu, untuk tercapainya angka yang rasional,” jelasnya.

Tito pun bersyukur Pemilu 2024 relatif berjalan aman, lancar, dan damai. Hal ini merupakan capaian lantaran pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024 tersebut adalah terbesar di dunia karena berlangsung dalam satu hari.

Mendagri menjelaskan, pemilu di Indonesia berbeda dengan pemilu di negara besar lainnya, seperti Amerika dan India yang prosesnya tidak berlangsung dalam sehari.

“Jadi yang betul-betul melaksanakan satu hari terbesar di negara demokrasi itu adalah Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, kata Mendagri, pemerintah mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan gelaran tersebut, baik KPU, Bawaslu, maupun pihak terkait lainnya. “Kami menghadiri pada saat rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu (tanggal) 20 Maret lalu yang tadi hasilnya sudah disampaikan,” ujarnya.

Namun, Mendagri tak memungkiri apabila Pemilu 2024 masih terdapat kekurangan, baik dalam proses penyelenggaraan maupun dukungannya. Kendati demikian, pemilu di Indonesia terus mengalami perbaikan dibanding pada masa Orde Baru. Saat ini pemilu di Indonesia berlangsung secara terbuka, bebas, dan rahasia. Selain itu, pemilu juga didukung oleh lembaga independen yang pembentukannya turut melibatkan DPR.

“Berbeda dengan di zaman sebelum zaman 99 (tahun 1999), di zaman Orde Baru semua lembaga-lembaga itu ada di bawah Kemendagri. Ini adalah kemajuan sebetulnya bagi bangsa Indonesia, cuma kalau ada kurang-kurangnya pasti ada kurang,” jelasnya.

Lebih lanjut, tambah Mendagri, saat ini proses rekapitulasi secara manual atau real count juga disiarkan secara langsung, mulai dari tingkat kabupaten maupun kota. Ini menunjukkan bahwa proses pemilu berlangsung terbuka dan dapat dikoreksi oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

“Itu untuk menunjukkan bahwa makin transparan dan makin akuntabel dalam proses demokrasi,” tandasnya. • RDO





EVALUASI PEMILU 2024 PERSIAPAN HADAPI PILKADA

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan evaluasi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR. Bawaslu menyebutkan bahwa selama tahapan Pemilu 2024 telah melakukan sebanyak 141.008 upaya pencegahan.

Beberapa bentuk yang dilakukan ialah mengidentifikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), melakukan pendidikan pengawasan partisipatif melalui Bawaslu Ngampus; Pendidikan Pengawas Partisipatif, serta mengeluarkan naskah dinas seperti surat edaran dan imbauan.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menjelaskan kerja pengawasan Bawaslu disesuaikan menurut tahapan yang berjalan pengawasan verifikasi partai politik, pengawasan DPT, pengawasan pencalonan, pengawasan logistik.

Berdasarkan hasil pengawasan kampanye, terdapat 3.474 dugaan pelanggaran dari tanggal 28 November 2023 hingga 12 Januari 2024. Pada periode yang sama, kata Bagja, terdapat 1.294 saran perbaikan.

Bawaslu juga mengawasi kampanye di media sosial atau media siber. Bagja mengatakan dari 355 konten yang sudah diawasi, platform Facebook merupakan platform dengan jumlah dugaan pelanggaran konten paling banyak, yaitu konten (33,2 persen). Sedangkan, platform YouTube merupakan platform dengan jumlah dugaan pelanggaran konten paling sedikit, yaitu 2 (0,6 persen).

“Dari 355 konten yang sudah diawasi, ujaran kebencian diidentifikasi menjadi jenis dugaan pelanggaran paling banyak, yaitu 340 (96 persen), sedangkan untuk jenis dugaan pelanggaran berita bohong memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 5 (1 persen),” ungkap Bagja dalam forum rapat kerja bersama DPR, pemerintah, KPU, dan DKPP, di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

Selanjutnya, hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, Bawaslu menemukan sebanyak 19 permasalahan. Rinciannya, 13 permasalahan pada pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara.

Bagja mengatakan data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

Dia merinci beberapa masalah dalam pemungutan suara itu, antara lain surat suara tertukar, pembukaan TPS lebih dari pukul 07.00, terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el, pemilih mencoblos lebih dari sekali.

“Bawaslu merekomendasikan adanya pemungutan suara ulang (PSU), Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan (PSL), pemungutan suara susulan (PSS) totalnya sebanyak 1.692 TPS, namun yang ditindaklanjuti KPU hanya 1.521 TPS,” terangnya.

Dalam penanganan pelanggaran di seluruh tahapan Pemilu 2024, Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, mengungkapkan dari seluruh laporan dan temuan yang masuk dinyatakan terdapat 531 pelanggaran, 386 bukan pelanggaran, dan 279 proses penanganan.

“Ini data sampai dengan bulan Februari 2024. Dari tren jenis pelanggaran di seluruh tahapan pemilu, terdapat 71 pelanggaran administrasi, 266 pelanggaran kode etik, 63 pelanggaran pidana, dan 163 pelanggaran hukum lainnya,” kata Herwyn.

Terkait penyelesaian sengketa, dia mengatakan dalam tahapan verifikasi dan penetapan parpol permohonan yang tidak diterima ada 12 permohonan, tidak dapat diregister 3 permohonan, serta diregister ada 6. Hasil penyelesaiannya para pihak sepakat mediasi ada satu, sedangkan lima sisanya dikabulkan sebagian.

Dalam penetapan DCS dan DCT Pileg, Herwyn mengatakan ada 3 permohonan tidak dapat diterima, 16 permohonan tidak dapat diregister, serta 121 permohonan diregister. Hasil penyelesaiannya sepakat mediasi ada 78, menolak seluruhnya 30, mengabulkan sebagian 8, mengabulkan seluruhnya 2, serta gugur ada 3.

“Terkait penyelesaian sengketa antar-peserta (PSAP) total terdapat 113 Permohonan PSAP yang tersebar di 54 Kabupaten/Kota dari 16 provinsi. Hasilnya 110 permohonan tercapai

kesepakatan antar-peserta dan 3 permohonan diputuskan Bawaslu,” papar Herwyn.

Sementara, Anggota Bawaslu, Puadi, menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada. Menurutnya, perlu melakukan identifikasi permasalahan dari berbagai aspek dan kasus-kasus yang dirasakan menarik sekaligus mempersiapkan rujukan dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024 meskipun menggundakan undang-undang yang berbeda.

“Dalam menangani tindak Pemilu 2024 ada cerita baik, ada pula cerita kurang baik. Pengalaman selama menangani Pemilu 2024 perlu dilakukan evaluasi dari berbagai aspek dan kasus-kasus yang dirasakan menarik,” kata Puadi saat membuka Rapat Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024.

Mantan Anggota Bawaslu DKI Jakarta ini menilai perlunya evaluasi dari aspek perundang-undangan yang mana UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bersifat ‘lex specialis’ dengan waktu penanganan tindak pidana terbi-

lang cepat.

Seperti Pasal 486 UU 10/2017 yang berisi empat ayat menjelaskan keberadaan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dari tiga institusi, yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dari mulai jajaran tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tentu mengalami permasalahan dalam proses melakukan penanganan tindak pidana pemilu.

“Penerapan norma hukum yang multitafsir, tidak aplikatif, dan adanya kekosongan hukum, sehingga membuat waktu penanganan pelanggaran yang menjadi panjang menjadi catatan satu aspek perundang-undangan. Kemudian aturan pelaksana seperti PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian dari aspek teknis dalam kesiapan Gakkumdu yang kelembagaannya berkaitan tentang apakah pelaksanaannya proses penanganan mengalami kendala. Hal-hal inilah yang menjadi catatan untuk kita evaluasi apa yang menjadi kendala. Termasuk dari aspek penganggaran,” jelas Puadi.

Dia juga menunjuk perlunya melakukan pembahasan evaluasi berdasarkan kasus-kasus menarik selama menangani tindak pidana Pemilu 2024.

“Seperti (sebenarnya apa) yang dimaksud pemalsuan dokumen, pelibatan kepala desa, kampanye di luar jadwal. Juga berkaitan dengan yang disebut politik uang. Juga adanya rekomendasi Bawaslu diadakannya PSU akibat ada warga negara Indonesia yang mencoblos lebih dari satu kali dengan penanganan pidananya,” tuturnya.

Dia merasa perlu mempertajam pemahaman bersama sekaligus membuat kesolidan Sentra Gakkumdu.

“Semoga bisa diidentifikasi untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan yang menjadi rujukan kita dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Saya harap kegiatan ini bisa menghadirkan solusi dan menciptakan Gakkumdu yang solid di tingkat kabupaten/kota sehingga bekerja lebih baik lagi,” tutupnya. ● RDO





“Jangankan masyarakat, caleg saja itu memahami posisi sirekap ini kadang-kadang juga confuse, apalagi dari sirekap ke info pemilu itu, ini yang membuat sering timbul masalah”

Ahmad Doli Kurnia

INFO
KPU

15

Minggu IV • Maret 2024

EVALUASI TOTAL SIREKAP KPU

Komisi II DPR bakal mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024, salah satunya terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pihaknya sudah pernah mengingatkan Sirekap hanya sebagai alat bantu. Nyatanya, alat bantu tersebut membuat kacau ruang publik.

“Jangankan masyarakat, caleg saja itu memahami posisi sirekap ini kadang-kadang juga confuse, apalagi dari sirekap ke info pemilu itu, ini yang membuat sering timbul masalah,” ucap Doli saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

Rapat berlangsung dengan pemaparan dari pemerintah tetapi belum sampai pada pandangan dari masing-masing fraksi. RDP dilanjutkan pada Senin, 1 April 2024. Komisi II DPR bakal mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Evaluasi total bakal dilakukan.

“Kalau kita lihat presentasi masing-masing, dari KPU, kemudian dari pemerintah, kemudian dari Bawaslu, termasuk DKPP itu laporannya panjang-panjang semua,” ujar Doli.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan evaluasi akan dilakukan secara bertahap. Sebab, banyak substansi yang harus dilihat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Maka kita sepakat tadi mengambil waktu yang cukup panjang, sehari. Mungkin nanti kita hari Senin depan, bisa jadi pagi, siang sampai malam, atau mau dua hari silahkan saja,” ungkap dia.

Doli mengakui masih banyak kelemahan penyelenggaraan pemilu, sehingga akan dievaluasi secara total.

“Sehingga nanti pada pelaksanaan pemilu berikutnya kita tahu mana titik-titik lemah dan apa yang kita harus sempurnakan. Itu yang nanti mau kita elaborasi minggu depan,” ujar dia.

DPR mempertanyakan penggunaan Sirekap oleh KPU karena sebelumnya dalam pembahasan rancangan tahapan yang telah disusun 2,5 tahun lalu, Sirekap tidak masuk dalam sistem informasi KPU.

“Waktu itu yang disampaikan hanya ada Silon (sistem informasi pencalonan), kemudian tidak Sirekap, saya waktu itu tanya secara spesifik, Sirekap bagaimana? Kami tidak akan menggunakannya (KPU), tapi waktu kemarin pada saat pembahasan PKPU tiba-tiba

Sirekap masuk,” kata Doli.

Pada akhirnya, DPR hanya memberikan catatan khusus terhadap Sirekap untuk menjadi alat bantu karena sistemnya sudah dibangun oleh KPU. Namun, dalam perjalanannya Sirekap membuat kacau rekapitulasi Pemilu 2024.

“Artinya mungkin sistemnya (Sirekap) tidak, tapi pemahaman kita semua bukan hanya masyarakat, Caleg saja itu memahami posisi Sirekap kadang-kadang juga confused (bingung). Apalagi kalau dari Sirekap ke info pemilu itu yang membuat sering menimbulkan masalah,” ujarnya.

“Di Sirekap kelihatannya (angkanya) sekian, nanti di info pemilu sekian, nah itu salah satu contoh yang mungkin nanti akan kami evaluasi,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, menyoroti lemahnya sinergi penyelenggara daerah dengan KPU dan Bawaslu hingga penggunaan aplikasi Sirekap.

“Mungkin yang paling menarik adalah bagaimana KPU tidak bisa memberikan jawaban tentang masuknya Sirekap yang ternyata error dari daerah, walaupun mereka mengatakan bahwa ada salah pengambilan foto itu masuknya Sirekap,” kata Junimart.

Politisi PDIP itu menyebutkan penyelenggara daerah sulit bekerja sama dengan KPU hingga Bawaslu. Ia mencontohkan kejadian saat KPU tidak memberi dokumen C1 Pemilu saat diminta oleh Bawaslu. Kendati demikian, hal ini tidak berlaku di semua daerah.

Terkait Sirekap, Junimart mengatakan sebagian besar masyarakat heran ketika hasil suara bisa menurun. Menurutnya, hasil suara di Sirekap harusnya terus naik karena merekapitulasi perolehan suara di daerah-daerah.

Junimart mengatakan dalam rapat komisi II tidak hanya akan mengkritisi KPU terkait Sirekap, namun juga Bawaslu. Sebab, menurutnya Panitia Pengawas tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan.

Dia juga menemukan fakta di lapangan bahwa Panitia Pengawas alias Panwas meminta uang ketika para calon legislatif meminta dokumen C1. Padahal, dokumen C1 berisi informasi terkait jumlah suara sah, suara tidak sah, serta perolehan suara untuk masing-masing kandidat dan partai politik.

“Ini sudah mengarah kepada transaksional dan kita punya bukti itu semua.

Nanti Bawaslu bisa jelaskan, apakah masih mempertahankan Panwas sekarang dalam rangka Pilkada nanti,” ujar Junimart.

Dalam paparannya di hadapan DPR, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menyebutkan KPU memiliki enam sistem informasi, yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka), dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Hasyim mengatakan, dalam pelaksanaannya, Sirekap merupakan alat bantu dokumentasi hasil tingkat TPS dan alat bantu proses rekapitulasi secara berjenjang. Sirekap dapat mengumpulkan pindaian C hasil dan D hasil. Selain itu, Sirekap juga dapat memudahkan publik dalam mengakses dokumen C Hasil dan D Hasil.

Diketahui, KPU mulai menghapus sejumlah kelengkapan data termasuk diagram hasil penghitungan suara Pilpres dan Pileg 2024, Selasa, 5 Maret 2024 malam. Mereka memang berulang kali mendapat kritik bertubi-tubi soal kegagalan data pada aplikasi terbaru tersebut.

KPU pun sempat melakukan sejumlah perbaikan terutama dengan menunda menampilkan data pembacaan langsung sistem pada form C Hasil yang kerap keliru. Mereka lebih dulu melakukan verifikasi baru mengunggahnya pada Sirekap.

Akan tetapi, KPU kembali dikritik setelah terjadi lonjakan suara yang sangat anomali pada perolehan suara PSI di Pileg 2024. Perolehan suara partai besutan putera bungsu Presiden Joko Widodo ini tiba-tiba melesat dari 2,8 persen menjadi 3,13 persen dalam satu hari.

Beberapa media dan pengguna internet pun berhasil menemukan kegagalan data yang diunggah ke Sirekap, terutama suara untuk PSI. Padahal, sebelumnya KPU mengklaim lebih dulu melakukan verifikasi sebelum memperbaharui data Sirekap.

Usai diterpa isu data janggal suara PSI, KPU menghapus sebagian besar data yang ditampilkan pada situs pemilu2024.kpu.go.id. Kini, situs tersebut hanya menyajikan foto dari formulir C-1. Masyarakat tak lagi bisa mendapatkan rekapitulasi data yang masuk ke KPU.

●RDO





Berkat Perjuangan Agus Fatoni BANDARA GATOT SOEBROTO WAY KANAN SEGERA BEROPERASI

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni terus berusaha memperjuangkan reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan hingga beroperasi secara komersial kembali. Berbagai upaya mulai dari audiensi langsung dengan Menteri Perhubungan hingga berbagai Rapat Koordinasi juga terus dilakukan.

Hingga saat ini perjuangan tersebut mulai berbuah manis. Fatoni menyebut salah satu maskapai penerbangan, Citilink telah menyetujui untuk beroperasi di Bandara Gatot Soebroto Way Kanan jika nantinya kembali dioperasikan secara komersial.

“Dari seluruh rangkaian yang sudah kita buka terakhir sekali kemarin tim dari Provinsi Lampung dan Sumsel juga Way Kanan sudah sudah bertemu dengan Dirut Citilink membahas tentang penerbangan Way Kanan dan sudah disetujui bahwa Citilink sudah tersedia pesawat yang akan beroperasi dari Halim ke Way Kanan,” kata Fatoni dalam Rapat Koordinasi Percepatan Reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan.

Hal ini tentunya merupakan sebuah kabar gembira bagi seluruh pihak yang memperjuangkan reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan. Direncanakan maskapai Citilink akan beroperasi selama dua kali dalam seminggu dengan rute Jakarta - Way Kanan.

“Telah disepakati dalam seminggu itu ada dua kali penerbangan dan itu pada jam yang bagus, jadi dari Halim jam 10 terus langsung kembali jam 11 lewat dari Way Kanan. Jadi ini dalam seminggu akan dilaksanakan dua kali,” ucap Fatoni.

Fatoni sangat berharap rute penerbangan tersebut dapat segera beroperasi sebelum momen lebaran tiba. Namun, hal tersebut tentunya baru bisa direalisasikan tergantung kesiapan seluruh pihak.

“Kita berharap penerbangan ini sudah bisa beroperasi sebelum lebaran. Oleh karena itu ini tergantung kesiapan kita semua,” kata Fatoni.

Terkait hari keberangkatan dan tarif penerbangan hingga saat ini belum diputuskan. Namun, Fatoni menyarankan agar dilakukan penerbangan pada hari Minggu dan Kamis.

“Saya bisa usul itu mungkin bisa Minggu, Selasa dan Kamis. Minggu itu untuk rapat di Jakarta pada hari senin. Kemudian Kamis



itu mungkin bisa rapat di hari Jumat. Itu misal penerbangan tiga hari. Kalau misal hanya dua hari itu saya menyarankan hari Minggu dan Kamis,” kata Fatozi.

Selanjutnya, hal lain yang perlu disiapkan adalah terkait penumpang yang nantinya akan memenuhi kapasitas tersebut. Fatoni juga mengimbau agar para Pemda sekitar seperti, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan, Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU).

Kemudian Pemkab OKU Selatan, Pemkab OKU Timur dan Pemkab Lampung Barat yang hendak melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk menggunakan Bandara Gatot Soebroto Way Kanan.

“Nah nanti setelah ini Pak Sekda bisa memimpin untuk membagi penumpang tadi, misal Way Kanan itu 15 penumpang, kemudian OKU Timur 15 orang, OKU Selatan berapa, Lampung Barat berapa,” ucap Fatoni.

“Penumpang ini bisa dari ASN atau PNS yang sedang melakukan perjalanan dinas atau masyarakat juga bisa tapi harus bisa dipastikan itu bisa dari daerah,” sambungnya.

Fatoni juga mengimbau Pemda sekitar Bandara Gatot Soebroto Way Kanan untuk mengencarkan promosi reaktivasi bandara tersebut.

“Itu juga kita harus melakukan promosi untuk flyer, spanduk, medsos untuk segera disiapkan,” kata Fatoni.

Fatoni meminta kesiapan seluruh pihak baik itu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan, Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan, Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU), Pemkab OKU Selatan, Pemkab OKU Timur dan Pemkab Lampung Barat untuk segera melakukan pergeseran anggaran yang telah disepakati dalam MoU sebelumnya.

“Ini yang perlu segera disiapkan dengan mekanisme pergeseran anggaran yang berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT). Kalau BTT nggak cukup bisa ditop up dari sisa kegiatan atau bisa diambil dari uang kas yang ada, jadi dilihat dulu BTT cukup atau tidak,” jelas Fatoni.

“Kalau cukup bisa langsung dilakukan pergeseran anggaran untuk dialokasikan ke bantuan keuangan bersifat khusus ke Way Kanan dan dari Way Kanan bisa mekanisme subsidi kepada maskapai,” sambungnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyatakan siap mendukung percepatan reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan bersama seluruh pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Sumsel, Kabupaten OKU, dan Kabupaten OKU Selatan Sumsel.

Dukungan seluruh daerah ini menjadi dasar utama bagi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menyetujui aktivasi bandara tersebut.

Menhub Budi Karya Sumadi bahkan mengupayakan ketersediaan pesawat ATR guna mendukung percepatan reaktivasi bandara.

“Ops pertama itu pesawat ATR, itu kami upayakan untuk disediakan ya, kami akan upayakan semaksimal mungkin. Tapi pada prinsipnya kami akan upayakan percepatan reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan akan segera beroperasi untuk komersil kembali,” kata Menhub di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI), Jakarta.

“Ini jadi bisa silahkan lakukan saja reaktivasi aja. Itu berita baiknya ya,” tegas Menhub. • RDR





“Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menjaga kondusifitas wilayah”

Brigjen Pol M Zulkarnain

PERTAHANKAN PREDIKAT SUMSEL ZERO KONFLIK SELAMA RAMADHAN

Provinsi Sumatera Selatan dikenal sebagai daerah aman dari berbagai kerusuhan antar suku, agama dan golongan sehingga dikenal sebagai daerah zero conflict.

Untuk itu Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni meminta masyarakat menjaga kondusifitas guna mempertahankan predikat Sumsel zero conflict selama bulan ramadhan.

Hal ini diungkapkan dalam sambutannya sebelum melaksanakan salat tarawih berjamaah dengan jajaran perwakilan Polda Sumsel di Masjid As-Sa'adah Mapolda Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (19/3/2024).

“Kita bersyukur Sumsel sangat kondusif, baik Bupati, Walikota, BUMD, BUMN dan instansi vertikal dan komponen juga masyarakat sama-sama kondusif. Mari kita saling jaga kondusifitas wilayah Sumsel bersama-sama,” ucap Fatoni dalam berbagai kegiatan sholat tarawih.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel terus berupaya menjadikan Sumsel sebagai daerah yang maju. Sehingga berbagai program maupun gerakan serentak terus diluncurkan guna mendukung cita-cita tersebut.

“Pemprov Sumsel juga terus meluncurkan gerakan serentak, di antaranya adalah Gerakan Serentak Pengendalian Inflasi se-Sumsel, Gerakan Pasar Murah se-Sumsel yang diadakan setiap Senin, Selasa Kamis kemudian Gerakan Serentak Bedah Rumah se-Sumsel yang akan membangun 8.391 rumah dan ini kami harap akan terus bertambah. Kemudian ada lagi Gerakan Serentak Pembangunan Sanitasi se-Sumsel dan Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumsel,” kata Fatoni.

Melalui kesempatan ini, Fatoni secara pribadi juga berterima kasih kepada Polda Sumsel yang telah menyelenggarakan shalat tarawih. Kedepannya kegiatan Safari Ramadhan akan terus berlanjut sepanjang bulan ramadhan dengan pelaksanaan salat tarawih di lokasi-lokasi lain sekaligus mempererat tali silaturahmi.

“Terima kasih pada Polda yang menyelenggarakan salat tarawih ini. Mungkin kalau tidak ada Safari Ramadhan kita belum tentu bisa datang ke sini,” ungkap Fatoni.

“Semoga amal kita dijaga Allah SWT sehingga kita selalu terhindar perbuatan yang jahat, keji dan dituntun melakukan kebaikan semoga kita semua dalam lindungan dan pertolongan Allah SWT,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Waka-polda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain berterima kasih atas kehadiran Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dalam kegiatan tarawih kali ini. Dia menyebut



menjaga keamanan serta kondusifitas wilayah Sumsel menjadi tanggung jawab bersama-sama.

“Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menjaga kondusifitas wilayah,” katanya.

Ajak Umat Muslim Tetap Produktif

Agus Fatoni mengajak masyarakat terutama umat muslim di Sumsel untuk tetap produktif dalam bekerja di bulan Ramadhan. Selain itu, dia meminta mereka hendaknya terus bersyukur karena dipertemukan kembali pada bulan Ramadhan.

“Semoga kita dapat memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya dan melaksanakan kegiatan kantor seperti biasa bahkan bisa lebih meningkat lagi,” ujar Fatoni.

Menurutnya, bulan Ramadhan juga dapat dijadikan sebagai momentum dalam meningkatkan amal ibadah serta membersihkan hati, pikiran dan jiwa. Sehingga diharapkan pada Idul Fitri semua bersih dan suci seperti bayi yang terlahir kembali.

Selain itu, Fatoni mengatakan selama satu bulan ke depan seluruh amal ibadah umat muslim dilipatgandakan sehingga sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya dengan meningkatkan ibadah shalat sunnah, membaca Al-Qur'an bahkan berbagi dengan sesama.

Dia juga mengajak mereka untuk semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Menurutnya, momentum bulan Ramadhan menjadi ujian dalam meningkatkan keimanan serta ketaqwaan pada Allah SWT.

“Ini seperti latihan nanti akan ada kelulusannya 1 Syawal. Saat itu kita akan dapat ijazah, predikat dengan nilai berbeda-beda. Ada yang maksimal, menengah dan bawah. Diharapkan dengan ujian itu kita bisa naik ke -

las dengan mempertahankan apa yang telah kita lakukan selama Ramadhan. Jangan turun kelas lagi,” jelasnya.

Tak ketinggalan, Fatoni juga mengingatkan masyarakat Sumsel untuk tetap menjaga iklim kondusif dan mempertahankan predikat zero konflik di Provinsi Sumsel selama bulan Ramadhan.

“Meski Pemilu telah berakhir dan berjalan lancar, iklim yang kondusif dan zero konflik harus tetap kita jaga sampai Pilkada mendatang. Karena iklim yang kondusif menjadi modal utama kita melakukan pembangunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Kesra Pemprov Sumsel Sunarto mengatakan seperti sebelumnya, Pemprov Sumsel rutin menggelar pengajian Ramadhan dan Shalat Tarawih bersama setiap bulan Ramadhan. Pengajian ini digelar dengan melibatkan Forum Organisasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BUMN, BUMD dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel secara bergiliran.

“Untuk semua yang telah berkontribusi atas kelangsungan acara ini kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih,” jelasnya.

Adapun dalam kegiatan shalat Tarawih bertindak sebagai Imam adalah Ustadz H. Abdurrahman Romli Al Hafidz dan Penceramah H.

Bito Purnomo. Kegiatan ini diawali dengan shalat Isya berjamaah, sambutan Pj Gubernur Sumsel, Tausiyah/kultum, tarawih 8 rakaat dan shalat witir 3 rakaat.

•RDR





IKLIM INVESTASI DI MUBA PATUT DITIRU

Pencapaian Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di masa kepemimpinan penjabat Bupati Muba, Apriyadi Mahmud cukup signifikan. Prestasi ini membuat Pj Gubernur Sumsel Dr Agus Fatoni MSi mengapresiasi Pj Bupati Apriyadi Mahmud yang mampu membuat kolaborasi antara perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Muba bersinergi sangat luar biasa.

“Muba luar biasa, ini sinergi yang sangat baik sekali. Saya sangat apresiasi kolaborasi yang sudah dilakukan Pak Bupati Apriyadi,” ujar Pj Gubernur Sumsel, Dr Agus Fatoni MSi.

Lanjutnya, perusahaan di Muba harus terus menyatukan langkah ke depan untuk Muba yang lebih sejahtera dan Sumsel yang lebih baik. Dengan bersama akan banyak yang bisa dilakukan.

Ia menambahkan, iklim investasi di Muba diharapkan terus berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Muba dan Provinsi Sumsel.

“Mari kita jaga terus iklim investasi, dan terus berbuat untuk kebaikan,” ucapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengatakan, Pemkab Muba terus menjaga iklim investasi di Muba.

“Yang paling penting dalam hal ini adalah menjaga kondusifitas wilayah, agar iklim investasi terus terjaga dengan baik,” ujar Apriyadi.

Ia menambahkan, Pemkab Muba juga sangat konsen terhadap persoalan ketenagakerjaan, oleh sebab itu di Muba telah memiliki Perda untuk setiap perusahaan di Muba wajib menyerap tenaga kerja lokal.

“Saya minta agar perusahaan-perusahaan di Muba patuh dan taat aturan agar sinergi terus terjaga dan memberikan kontribusi kepada masyarakat di Muba,” tukasnya.

Lanjutnya, pada tahun 2025 Kabupaten Muba akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Porprov, oleh sebab itu peran perusahaan di Muba sangat diharapkan agar pelaksanaannya nanti berjalan lancar.

“Semoga terus bersinergi, dan sesuai arahan pak Gubernur tadi bahwasannya perusahaan-perusahaan di Muba harus proaktif turut mensukseskan Porprov di Muba,” pungkasnya.

Raih Juara Paritran Award

Keberhasilan Pemkab Muba membangun iklim usaha yang baik membuat Pj Bupati Apriyadi Mahmud berhasil meraih Juara 1 Paritran Award 2023 tingkat Provinsi Sumsel.

Penghargaan diserahkan Pj Gubernur Sumsel Dr Drs Agus Fatoni MSi didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel Muhyidin kepada Pj Bupati Apriyadi Mahmud dalam rangkaian Penganugerahan Paritran Award Tahun 2023.

Diketahui, Paritran Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden RI kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan pelaku usaha yang mendukung penuh pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

“Pemkab Muba terus berkomitmen untuk memberikan naungan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Muba. Terutama pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim,” ujar Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

“Alhamdulillah penghargaan ini adalah bonus dan suntikan motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik kedepannya,” tambahnya.

Ia menambahkan, jaminan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja, karena perlindungan ini dapat meningkatkan rasa aman bagi keluarga pekerja, juga memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan.

“Oleh sebab itu kita fasilitasi warga Muba untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan di Muba,” terangnya.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini memang layak untuk terus dikembangkan mengingat memang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Terima Kasih atas apresiasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Kami bekerja ini semata mata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tambahnya.

Apriyadi menambahkan, capaian lainnya juga diraih Desa Epil dan Desa Bailangu yang mendapatkan Anugerah Paritran Award



Tingkat Desa.

“Selamat kepada Desa Epil dan Bailangu, capaian ini akan terus memotivasi,” tukasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Dr Drs Agus Fatoni MSi mengucapkan selamat kepada Pemkab Muba yang berhasil meraih juara Paritran Award 2023.

“Semoga capaian ini dapat terus memotivasi Pemkab Muba untuk memfasilitasi kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja di Kabupaten Muba,” tuturnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel Muhyidin, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk masyarakat.

“Saat ini ada 1,1 juta yang tercover BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Sumsel,” berbarnya.

Ia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk melayani masyarakat terutama di Sumsel. “Saat ini kami juga menyasar kalangan pedagang, juga pekerja sektor informal,” ungkap dia.

Seperti di Kabupaten Muba yang telah mengcover 11 ribu pekerja rentan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini patut kita apresiasi, dan sangat luar biasa atas kegetolan pak Bupati Apriyadi melindungi pekerja rentan,” tandasnya.

Ia menambahkan, peraih Paritran Award ini telah melewati seleksi yang sangat ketat dengan melibatkan tim penilai yang berkompeten.

“Kami ucapkan selamat kepada Pemkab Muba dibawah kepemimpinan Bupati Apriyadi yang telah meraih Paritran Award,” pungkasnya. ●RDR





“Operasi pasar murah dilaksanakan dalam bulan Ramadan untuk meringankan beban masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa”

Asmar Wijaya

RIBUAN PAKET SEMBAKO MURAH HADIR DI OKI

Upaya untuk menekan angka inflasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan melibatkan semua pihak. Salah satunya dengan menggandeng PT Sampoerna Agro dan Badan Pusat Statistik (BPS) OKI yang menghadirkan 1.000 paket sembako murah dalam program Perjaka (Perusahaan Jaga Ketertjangkauan Harga) di Kayuagung.

Program Perjaka ini merupakan upaya nyata Pemkab OKI dalam mengendalikan inflasi dan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

“Terima kasih kepada PT Sampoerna Agro, Tbk, BPS OKI, dan Bank Sumsel Babel beserta UMKM binaannya atas kolaborasinya dalam program ini,” ujar Penjabat Bupati OKI, Asmar Wijaya, saat membuka pasar murah.

Pada kesempatan tersebut, disediakan 1.000 paket beras 5 kg dan minyak goreng 1 liter seharga Rp 60.000 per paket. Selain itu, terdapat 1.000 paket pangan murah berisi 1 kg bawang merah, 1/4 kg bawang putih, 15 butir telur ayam, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng seharga Rp 70.000 per paket.

Asmar Wijaya menjelaskan, program Perjaka ini telah dilaksanakan sebanyak 25 kali dan akan terus berlangsung 3 kali dalam seminggu.

“Fokus pelaksanaan pasar murah ini di tiga kecamatan, yaitu Kayuagung, Pedamaran, dan Tanjung Lubuk,” kata Asmar.



“Semoga program ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di OKI,” imbuhnya.

Kegiatan ini mendapat reaksi positif dari masyarakat Kabupaten OKI. Selain bisa mendapat harga sembako murah mereka juga dapat melengkapi kebutuhan di bulan Ramadan.

Salah seorang warga Kayuagung, Yuliana, mengaku sangat terbantu dengan adanya program pasar murah ini.

“Harga sembako di pasaran sekarang memang mahal, jadi program ini sangat membantu kami,” kata Yuliana.

Ia berharap program ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat di OKI.

Program Perjaka merupakan contoh nyata sinergi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat dalam menjaga ke-

tahanan pangan di daerah.

Kerjasama seperti ini diharapkan dapat terus terjalin dan diperkuat untuk mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sukses Tekan Inflasi

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah meluncurkan serangkaian kegiatan yang bertujuan menangani masalah inflasi yang tengah dihadapi saat ini.

Salah satunya melalui program pasar murah yang telah digelar sebanyak 20 kali guna meringankan beban masyarakat untuk membeli sembilan bahan pokok (Sembako) selama bulan Ramadan.

“Operasi pasar murah dilaksanakan dalam bulan Ramadan untuk meringankan beban masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa,” Kata Asmar pada gelaran pasar murah di Desa Serigeni Baru.

Ia menambahkan operasi pasar murah yang digelar terbuka untuk masyarakat umum, sehingga masyarakat bisa langsung membeli berbagai macam sembako yang disediakan dengan harga yang cukup murah.

“Operasi pasar murah yang dilaksanakan sangat terbuka untuk masyarakat umum dan bisa dibeli dengan harga yang murah. Kegiatan ini juga berkontribusi dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah,” ujarnya.

Pada kegiatan operasi pasar murah di Desa Serigeni Baru ditawarkan dengan harga sebelum-sebelumnya yaitu, 1.000 paket sembako yang dipasaran itu senilai Rp. 110.000 bisa dibeli dengan harga Rp. 70.000 serta 500 Paket Beras 5KG plus Minyak Goreng 1 liter hanya Rp. 65.000.

Kegiatan ini disambut antusias warga desa karena harga-harga barang yang ditawarkan relatif terjangkau bagi mereka. ●RDR





Ade Indra Chaniago

PEMILU MELAHIRKAN PEMIMPIN TIDAK KOMPETEN

Sistem demokrasi transaksional yang terjadi saat ini melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas. Imbasnya pemimpin di Indonesia dilahirkan melalui rekrutmen Pemilu dinilai menciptakan figur yang tidak kompeten untuk mengurus rakyat. Kondisi itu terus berjalan sepanjang waktu dalam proses menentukan calon pemimpin.

Di sisi lain banyak pemimpin yang punya potensi dan niat tulus membangun bangsa harus tergusur oleh sistem transaksional. Mereka yang terpilih bukan hasil dari proses demokrasi berkualitas melainkan dengan cara transaksional.

Politisi senior Indonesia Anas Urbaningrum mengkritik Pemilu yang dinilai melahirkan pemimpin Indonesia atas dasar amplop atau politik uang. Mereka yang duduk di legislatif bukan karena kemauan tulus rakyat tapi karena unsur money politik. Dampaknya demokrasi tidak berjalan baik karena mereka lebih mementingkan pribadi daripada mementingkan rakyat.

“Pemilu melahirkan atau merekrut pemimpin di Indonesia. Mereka semua rata-rata bertarung menggunakan barisan amplop keadaan seperti ini yang kita ciptakan memilih pemimpin di Indonesia,” kata Anas saat memberikan kuliah kepemimpinan sekolah calon pemimpin (SCAPIM) Indonesia yang diselenggarakan Partai

Kebangkitan Nasional (PKN).

Dijelaskan Ketua Umum PKN ini, para pemimpin di Indonesia dikuasai oleh oligarki yang awalnya menjadi pemimpin di daerah kemudian berlanjut ke tingkat provinsi dan pusat. Kondisi ini pastinya dikuasai oleh pemimpin yang telah menguasai politik dan beragam celah untuk melegalkan semua cara untuk kembali menjadi pemimpin.

“Pemilu di legislatif rekrutmen kepemimpinan kemudian ke yudikatif. Pelaku-pelaku orang politik yang bergeser dari daerah ke kota dan pusat pergeseran politik ini mengancam demokrasi kita di

Indonesia,” pungkasnya.

Presiden Sekolah Calon Pemimpin (SCAPIM) Indonesia, Ramdoni mengatakan, seorang pemimpin itu akan menampilkan sosok dirinya. Bukan hanya mengandalkan orangtua atau pamannya.

“Dia tidak akan mengatakan itu karena pemimpin itu adalah dirinya sendiri. Negara yang begitu besar ini kita laksanakan sebagai kapal pemimpin adalah nahkodanya,” ucapnya.

Dijelaskannya hari ini kepemimpinan di Indonesia terjadi turbulensi krisis kepemimpinan secara fundamental kehilangan keteladanan dan kehilangan rasa malu.

“Di Indonesia sosok pemimpin yang kita miliki kehilangan dua prinsip pokok yaitu kehilangan keteladanan dan rasa malu,” tegasnya.

Sementara pengamat politik Sumatera Selatan (Sumsel) Ade Indra Chaniago juga membenarkan pemimpin di Indonesia melalui proses Pemilu yang menyebabkan banyaknya melahirkan hasil yang tidak diharapkan. Pasalnya pemimpin yang diciptakan cenderung tidak memiliki kapasitas

menjadi figur seorang pemimpin.

“Pemimpin sekarang kebanyakan manggut-manggut atau geleng-geleng saja hanya orang yang ditunjuk oleh oligarki,” tegasnya.

Dilanjutkannya proses Pemilu menciptakan pemimpin untuk rakyat dicetak melalui oligarki dan kekuatan uang. Setelah pemimpin itu memimpin Indonesia tidak memberikan efek kepada kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata.

“Pemimpin itu harus memiliki kapasitas tidak hanya menang melalui faktor oligarki dan kekuatan uang. Pemimpin itu harus tahu masalah yang dihadapi rakyat dan juga bisa mengatasi nya, itu baru pemimpin,” jelasnya.

Dia menilai kenapa mereka bisa terpilih di Pemilu karena dipelihara kebodohan dan kemiskinan membuat kondisi itu berdampak terus menerus oligarki berkuasa di Indonesia. Rakyat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan politik dan mendera kemiskinan terjebak untuk mengikuti lingkaran setan tersebut

“Ini tidak akan berhenti terus terjadi di Indonesia sudah seperti lingkaran setan. Selama kebodohan dan kemiskinan dijaga ini akan terus terjadi,” terangnya.

Dia juga menyebutkan tidak ada yang biasa disalahkan baik itu rakyat ikut memilih di Pemilu atau juga salah pemerintah. Baginya semua elemen masyarakat, pemerintah dan bahkan partai politik ikut bersalah dalam menentukan pemilihan di Pemilu.

“Sebenarnya middle class bisa memperjuangkan perubahan. Karena middle class itu golongan seperti akademik dosen mahasiswa yang memiliki ilmu dan mengetahui semua masalah yang terjadi sekarang. Nah mereka itu seharusnya memberi edukasi kepada masyarakat agar mereka paham jangan memilih pemimpin yang salah di Pemilu,” pungkasnya. ●RDR





“Ini yang menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia karena dompet masyarakat menipis uang rakyat itu tidak bergerak”

Yan Sulisty

JADI PENGAMAT TANPA RENCANA

Gaya bicaranya yang lugas, tegas dan penuh analisa menjadi ciri khas seorang Yan Sulisty. Sehingga tidak heran, dia dikenal sebagai pengamat ekonomi yang cukup kondang di Sumatera Selatan.

Namun siapa sangka Yan Sulisty dulunya tidak menyangka akan menjadi tenar. Padahal pria kelahiran Palembang 7 Januari 1970 dengan ciri khas rambut plontos dan style parlente ini, dalam kehidupan awalnya tidak memiliki cita-cita dalam kehidupannya.

“Keluarga saya semuanya ada di bidang kesehatan. Papa PNS dari Kementerian Kesehatan dan kakak saya dokter. Tetapi saya dulu tidak memiliki cita-cita mau jadi apapun dalam hidup saya,” kata Yan Sulisty.

Dia bercerita saat lulus SMA dia kuliah S1 Ekonomi jurusan Perbankan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas (STIE Ekuitas) Bandung dan lulus pada tahun 1997. Di saat itu dia memilih jurusan ekonomi hanya sekedar ingin kuliah saja dan dengan alasan suka dengan kampusnya saja.

“Kuliah di ekonomi bukan karena suka ekonomi ingin kuliah saja dan memilih kampus itu karena tempatnya bagus. Saya lihat dari interior kampus dan modern sekali tempatnya jadi ingin kuliah disana. Karena saat itu juga belum ada cita-cita dan harapan mau jadi apapun,” kata dia

Kemudian saat tamat kuliah tahun 1997 terjadi krisis moneter melanda Indonesia menyebabkan dirinya sulit mencari pekerjaan sampai meledaknya penurunan orde baru rezim Soeharto aksi demonstrasi tahun 1998. Namun akhirnya dia juga sempat diterima bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan di Bandung.

“Setelah itu ibu meninggal dunia karena kanker menyebabkan saya memutuskan untuk liburan di Palembang. Tiba-tiba saya ingin melanjutkan kuliah S2 itu di UNSRI tamat pada tahun 2021. Itulah memutuskan saya juga menjadi menetap untuk tinggal di Palembang,” ucapnya lagi.

Karirnya sebagai pengamat ekonomi dan politik di Sumsel mulai terbuka saat tamat kuliah S2 di Universitas Sriwijaya secara tidak sengaja terlibat dalam sebuah organisasi bernama Indonesia Marketing Asosiasi Sumsel dan mendapatkan jabatan tinggi sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) pada tahun 2003.

Kemudian pada tahun 2004 dipercaya sebagai Presiden Indonesia Marketing Asosiasi Sumsel membuat namanya semakin dikenal khususnya di kalangan para jurnalis ekonomi di Palembang.

“Setelah lulus kuliah saya menemukan idealisme harapan dan cita-cita dari diri karena terlibat sebuah organisasi ekonomi. Setelah menjadi Presiden di organisasi itu, saya sering diminta pendapat soal ekonomi di Sumsel oleh jurnalis di Palembang. Dari sana nama saya dikenal sebagai seorang pengamat

ekonomi dan juga politik,” ucapnya.

Setelan namanya dikenal luas Yan Sulisty sering mendapatkan panggilan untuk menjadi pembicara, pemantik dan narasumber di sebuah diskusi atau seminar. Bahkan dia sering di undang oleh kampus-kampus sebagai pembicara mengisi kuliah umum mengamati persoalan ekonomi di Indonesia.

“Aktivitas saya sekarang sibuk seperti itu sampai sekarang. Saya dipanggil sebagai pengamat ekonomi dan politik menurut saya itu semua buah dari kerja keras dan karir yang saya bentuk selama ini,” jelasnya.

Yan Sulisty memiliki hobi yang selaras dengan bidang yang ditekuninya sekarang. Dia sangat hobi membaca buku, artikel dan informasi terbaru soal perkembangan ekonomi dan politik di dunia dan Indonesia.

“Makanya jurnalis itu senang meminta komentar saya untuk jadi narasumber tulisan sebab saya lebih update dan sangat menguasai karena para akademisi atau dosen-dosen apabila jurnalis wawancara meminta keterangan mereka menyebutkan menolak alasan belum menguasai. Itu efek kurang update seperti saya, memang hobi utama saya adalah membaca,” pungkasnya.

Disisi lain dia mencermati ekonomi Indonesia dinilai sekarang sangat meresahkan masyarakat. Karena dompet masyarakat Indonesia sangat tipis dibandingkan ekonomi yang terus meningkat tidak bisa diimbangi oleharganya.

“Ini yang menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia karena dompet masyarakat menipis uang rakyat itu

tidak bergerak. Makanya ekonomi di Indonesia tidak pernah membaik, walaupun tren ekonomi positif atau baik ekonomi. Tetapi sebenarnya pendapatan masyarakat kita sangat kecil dompet rakyat menipis tidak tebal kehidupan pas-pasan,” jelasnya

Menurutnya sendi-sendi ekonomi di Indonesia digerakkan oleh para perusahaan yang memeras kaum buruh atau pekerja. Pergerakan kaum kapitalisme sangat besar dengan mempekerjakan dengan upah minimum. Bahkan negara menambah ikut memeras dompet rakyat dengan pajak yang tinggi, padahal pajak itu juga akan kembali ke masyarakat kenapa harus mencekik mereka.

“Uang itu hanya berputar di perusahaan saja. Kapitalisme sangat merajalela di Indonesia. Kita juga dibebani dengan

beragam pajak yang besar baik kendaraan dan sebagainya bagaimana dompet rakyat menjadi tipis tidak ada. Kita jadi objek pajak o l e h

pemerintah untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Sebaiknya pajak di Indonesia dikecilkan saja biar dompet rakyat tidak menipis. Kita jadi tidak bisa jalan-jalan liburan bisa membeli barang yang kita mau,” ungkapnya.

Dia menilai kenaikan harga di Indonesia dinikmati oleh pelaku-pelaku politik bukan pelaku-pelaku ekonomi. Kendati Pemerintah menggelontorkan Bansos tetap saja rakyat menderita. Karena semua pejabat politik juga terlibat dalam krisis kenaikan pelakunya para pelaku politik dan juga para menteri.

“Tidak berpengaruh siapapun presiden-nya pelaku politik dan para menteri terlibat dalam krisis kenaikan harga di Indonesia. Itu juga semua permainan politik,” ucapnya.

Kalau terjadi kenaikan beras petani pun tidak mendapatkan keuntungan karena HET (harga eceran tertinggi) naik tetapi pembelian gabah kepada petani tidak ikut naik. Dinilai itu faktor dari pabrik yang membeli gabah dari petani tidak mau membeli gabah dengan harga tinggi walaupun HET naik.

Pabrik membeli gabah dari petani dengan harga murah tidak akan memberikan untung kepada mereka (petani). Mereka pabrik produsen juga yang mengatur HET dipasaran dengan cara menahan barang menimbun agar harga tinggi.

Dampaknya HET tinggi tetapi petani tetap merugi mereka kunci dari bawah kepalanya mereka kibas-kibas ini kepentingan bisnis. Walaupun pemerintah menurunkan Satgas untuk mencari dampak kenaikan beras tidak ada gunanya hanya gimmick saja.

“Karena harga itu dinaikkan oleh produsen atau agen sengaja dan semua itu juga didukung oleh pemerintah juga,” pungkasnya. ●RDR





PPP GABUNG PRABOWO TUNGGU PUTUSAN MK

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi akan meninggalkan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemerintahan mendatang.

Namun, saat ini, partai berlambang Kakbah tersebut menyatakan tengah fokus ke sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, sikap partai terkait koalisi akan diputuskan usai putusan MK.

“Kita belum berandai-andai ke depan, karena PPP masih fokus terhadap gugatan di MK. Baru setelah nanti hasil MK seperti apa, kita putuskan,” ujar Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi.

Kendati demikian, kata Awiek, PPP tak membatasi siapapun untuk bersilaturahmi, termasuk kepada calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto.

“Dalam Islam diajarkan bahwa slaturahmi itu dianjurkan, karena membuka pintu rezeki. Jadi kalau ada kawan-kawan dari Gerindra, Prabowo khususnya, mau bersilaturahmi ke PPP, ya tentu kami sangat welcome dan sangat tersanjung,” ujar Baidowi.

Ia sendiri mengamini adanya komunikasi informal antara elite PPP dengan Partai Gerindra. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi waktu dan tempat silaturahmi Prabowo tersebut.

“Sampai saat ini posisi kami menunggu, kita tidak membatasi siapa yang mau bersilaturahmi. Siapapun boleh ke PPP, apalagi Prabowo dan Partai Gerindra,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Di sisi lain, Awiek menjelaskan bahwa PPP resmi mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) 2024 ke MK pada Sabtu, 23 Maret 2024. Permohonan itu dilakukan untuk menggugat hasil pemilu yang menyatakan suara partai berlambang Kakbah itu tak melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Dia mengatakan, partainya membawa 23 tim pengacara dalam mengajukan gugatan ke MK. Pokok dari gugatan itu tak lain terkait suara PPP yang hanya 3,87 persen dalam Pileg DPR.

“Suara PPP yang patut diduga hilang di sejumlah pemilihan, sehingga menyebabkan angka kami di dalam rekapitulasi KPU itu hanya menembus angka 3,87

persen. Artinya di bawah ambang batas,” kata dia.

Awiek mengatakan, cukup banyak gugatan yang dilakukan oleh PPP terkait hasil Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU. Gugatan itu mencakup dugaan pengurangan suara PPP di 18 provinsi atau sekitar 30 daerah pemilihan (dapil).

Menurut dia, gugatan yang dimohonkan oleh partainya telah didukung oleh alat bukti yang lengkap. Berdasarkan penelusuran internal partainya, ada suara PPP yang hilang di sekitar 30 dapil itu.

“Tidak banyak (yang hilang) di dapil itu. Paling 3 ribu, 4 ribu, tetapi terjadi di sepanjang dapil, sehingga ketika ditotal itu lebih dari 200 ribu. Nah itu yang terlacak,” ujar Awiek.

Awiek menambahkan, salah satu daerah yang menjadi lokasi bergesernya suara PPP adalah Provinsi Papua Pegunungan. Bahkan, ada caleg PPP dari Papua Pegunungan yang ikut hadir membawa bukti C Hasil yang menunjukkan jumlah suaranya lebih dari 5.000, tapi tak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat nasional yang hanya sekitar 200 suara.

“Yang ribumannya ke mana?” kata dia.

Ia mengklaim partainya telah meraih lebih dari 6 juta suara atau hampir 4,1 persen dalam pemilu 2024. Karena itu, PPP dinilai dapat lolos parlemen.

Sementara itu, Ketua LBH DPP PPP Erfandi Syaqrone mengatakan, ada tiga pokok petitem permohonan PHPU yang diajukan PPP. Pertama adalah agar MK bisa menghadirkan keadilan substansial untuk PPP.

“Kita minta MK untuk memberikan kesempatan sekaligus menetapkan PPP mendapatkan kursi di DPR,” kata dia.

Kedua, ia mengatakan, terdapat pengalihan suara PPP di beberapa dapil. Karena itu, MK harus dapat mengembalikan pengalihan suara itu kepada PPP. Karena suara itu merupakan hak PPP.

Erfandi mengatakan, berdasarkan bukti yang didapat oleh internal partainya, PPP mendapatkan 4,02 persen suara nasional. “Jadi, tidak jauh beda dengan survei internal dan itu didukung oleh bukti,” ujar dia.

Ketiga, PPP meminta adanya pemungutan suara ulang (PSU) yang menggunakan sistem noken. PSU itu terutama dilakukan di wilayah Papua.

Koalisi Besar

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons soal PPP yang masih menunggu untuk pertemuan dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dengan berkelakar, Muzani menyampaikan menunggu kedatangan PPP.

Muzani menganalogikan men-

unggu kepastian bergabungnya PPP ke koalisi Prabowo-Gibran dengan sebuah lagu. “Ya ada lagunya kan itu, ku tunggu kedatangan mu, ha-ha-ha,” ujar Muzani usai acara buka bersama dengan Prabowo-Gibran di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 25 Maret 2024.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, juga menilai bagus jika PPP bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan bahwa ihwal koalisi merupakan keputusan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pemenang Pilpres 2024. Termasuk soal peluang bergabungnya Partai Nasdem dan PPP dalam koalisi pemerintahan periode 2024-2029.

“Tentu bagi kami ya sepakat perkuatan parlemen ini penting, penguatan di parlemen penting, tapi siapa dan siapanya tentu akan dirangkul oleh Pak Prabowo. Ya itu sangat ditentukan Pak Prabowo itu sendiri,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

Di samping itu, Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka adalah pemimpin rakyat Indonesia yang terpilih lewat proses demokrasi. Sehingga menurutnya, wajar jika Menteri Pertahanan itu merangkul banyak pihak untuk kebaikan bangsa ke depan.

“Karenanya saya kira harus memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo yang sekarang justru aktif merangkul pihak manapun.

Mungkin setelah kemarin pertemuan dengan Nasdem akan merangkul akan berkunjung ke partai-partai lain yang selama ini berseberangan,” ujar Herman.

“Saya kira ini bagus untuk bagaimana merekatkan kembali residu-residu yang kemarin, yang terjadi akibat kemarin perbedaan pilihan, dan kemudian ini negara harus dibangun seluruh rakyat Indonesia, dan bagi kepentingan program presiden ke depan,” sambung anggota Komisi VI DPR itu. •RDO





“Jangan pancing sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar, 2014 kan ketua DPR kan bermasalah dan masuk penjara. Ketika etika dan norma diabaikan terjadi Karmapala”

Hasto Kristiyanto

JANGAN UTAK-ATIK UU MD3

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil memenangkan pemilihan legislatif untuk ketiga kalinya pada 2024 dan optimistis meraih 110 kursi di DPR. Artinya, posisi Ketua DPR akan menjadi milik PDIP untuk kedua kalinya.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap capaian itu merupakan prestasi tersendiri. “Setidaknya di tengah gempuran yang sangat dahsyat sebagai ujian sejarah PDI Perjuangan kami bisa mempertahankan posisi sebagai pemenang pemilu tiga kali berturut-turut,” ucap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

Menurut dia, tidak mudah bagi PDIP untuk memenangkan Pileg 2024 di tengah intimidasi terhadap pihaknya. Apalagi terdapat penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dari Presiden Joko Widodo.

Hasto menyebut, penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai yang terburuk, selama gelaran kontestasi di Indonesia. Hal serupa juga pernah dinyatakan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla (JK).

“Itu tidaklah mudah di tengah persoalan supremasi hukum yang turun ke tingkat nadir kemudian abuse of power yang sayangnya dilakukan Presiden Joko Widodo,” ujar Hasto.

Harapannya, seluruh kader PDIP bisa optimistis menyikapi hasil Pemilu 2024. Sebab, peroleh di tingkat kabupaten atau kota pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan 2019.

Jumlah kursi yang diperoleh PDIP di tingkat DPRD kabupaten/kota sebanyak 2.823 kursi. Angka tersebut meningkat 17 kursi dibandingkan Pemilu 2019.

“Kalau kami mengukur eksistensi PDI Perjuangan di tengah gempuran yang sangat dahsyat di tingkat kabupaten atau kota, ditinjau perolehan wakil ketua dan ketua DPRD, itu eksistensi kami 60 persen,” ujar Hasto.

Hastojugamenyindir tak adanya efek Presiden Jokowi

pada Pileg 2024. Hal tersebut terbukti dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak lolos ke parlemen, meskipun mereka kerap menggaungkan ‘Jokow15me’.

Sebaliknya, PDIP justru memenangkan Pileg 2024, meski harus kehilangan 18 kursi DPR RI. Hasto menyebut, hal itu sebagai bukti kekuatan partainya yang bekerja secara kolektif, bukan berdasarkan persona seseorang.

“Jadi yang ada bukan Jokowi effect, tetapi adalah bansos effect, penggunaan aparaturnegara effect, intimidasi effect, itu yang terjadi,” ujar Hasto.

Dia pun menyentil, raihan PSI yang di bawah batas minimum parlemen. “Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu, meskipun dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggonggokan itu,” ujar Hasto.

Selain itu, Hasto pun mengingatkan partai politik untuk tak mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

“Tidak bisa undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah pemilu berlangsung,” ujar Hasto.

Ia pun menyindir Partai Golkar yang kerap menyuarakan kemungkinan revisi UU MD3. Sebab, hal serupa pernah disuarakan partai beringin usai Pemilu 2014.

Menurutnya, seluruh partai politik harus membangun kultur politik yang baik, terutama berdasarkan jejak norma dan suprema-

masi hukum.

Di samping itu, ia mengingatkan agar Partai Golkar tak meniru apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Khususnya saat Jokowi meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

“Itu menunjukkan ambisi, nafsu kekuasaan, apakah tidak belajar dari dulu, ketika 2014 seharusnya apa yang disuarakan oleh rakyat melalui Pemilu itu, one electoral process, yang juga direpersentasikan di DPR,” ujar Hasto.

Hasto menegaskan, ambisi kekuasaan dengan segala upaya merebut kursi Ketua DPR justru akan menimbulkan konflik sosial. Apalagi, menggunakan instrumen hukum dengan mengubah aturan UU MD3.

“Jangan pancing sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar, 2014 kan ketua DPR kan bermasalah dan masuk penjara. Ketika etika dan norma diabaikan terjadi Karmapala. Itu yang seharusnya menjadi pelajaran,” ujar Hasto.

Pertemuan Mega dan Prabowo

Hasto mengatakan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak ada masalah untuk bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, seusai diumumkan putusnya sengketa pemilu oleh

Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan soal peluang Megawati bertemu dengan Prabowo pasca-hiruk pikuk Pemilu 2024.

“Jadi kalau bertemu, ya, tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto.

Selain itu, menurut dia, Puan Maharani tak ada masalah bila Prabowo melakukan silaturahmi pertemuan. Apalagi Puan sendiri berstatus sebagai Ketua DPR dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

“Mbak Puan kapasitasnya sebagai Ketua DPR, sehingga tugas sebagai Ketua DPR dalam melakukan komunikasi politik, dan Pak Prabowo sekarang juga kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan,” ujarnya.

Kendati demikian, Hasto menegaskan terkait urusan Pilpres 2024, PDI Perjuangan sendiri masih menunggu dan menghormati sengketa di MK. “Terkait dengan Pilpres kita masih menunggu hasil dari pada Mahkamah Konstitusi, sehingga tak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan,” tambah Hasto.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menegaskan, jika Megawati memiliki rekam jejak melawan rezim otoriter hingga pengkhianatan terhadap Konstitusi. Menurutnya, untuk sementara ke depan PDIP akan berfokus pada tema tersebut.

“Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi, tetapi bagi Ibu Megawati Soekarnoputri dengan rekam jejak yang sangat luas, terutama legitimasi beliau bersama PDI di dalam melawan rezim yang otoriter, yang anti demokrasi tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi terhadap demokrasi terhadap keadilan rakyat kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan,” tuturnya. ●RDO



“Saya lihat warga DKI Jakarta sebenarnya sudah tidak menginginkan lagi Pak Anies. Kenapa? Karena Pak Anies sendiri di Jakarta perolehan suara capres itu di bawah 50 persen”

William Aditya Sarana



KAESANG TINGGAL PILIH SOLO ATAU JAKARTA

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, disebut-sebut bakal maju pada Pilkada 2024. Pemuda 29 tahun ini bahkan diisukan akan maju antara Pemilihan Wali Kota Solo atau Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Dalam bursa Pilwalkot Solo, versi Soloraya Polling, Kaesang Pangarep berada di urutan ketiga setelah Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa dan Kanjeng Gusti Mangkunegara X Bhre Cakrahutomo.

Dari hasil survei 8-17 Maret, Teguh memiliki elektabilitas 35,3 persen dan tingkat popularitas 92,7 persen. Gusti Bhre dengan 78,5 persen kepopuleran dan 25,3 persen elektabilitas. Sedangkan, Kaesang menjadi tokoh paling populer dengan persentase 92,9 persen dan elektabilitasnya 14,1 persen.

Founder Soloraya Polling, Suwardi, mengatakan, ada 12 nama yang masuk dalam survei. Adapun survei tersebut melibatkan 640 responden dari 80 titik TPS di Kota Solo. Sedangkan, margin error dalam survei tersebut adalah 5 persen.

“Hasil survei dengan margin error 5 persen itu jangan diterima kebenarannya 100 persen. Kita berasumsi bahwa tingkat kepercayaan kita adalah 95 persen,” kata Suwardi, Selasa, 26 Maret 2024.

Suwardi menjelaskan, kecenderungan responden menginginkan Kota Solo dipimpin oleh tokoh berlatar belakang pengusaha, politisi, kalangan profesional serta santri. Setidaknya ada 66,1 persen responden yang menginginkan tokoh berusia 40-59 tahun dan 56,6 persen lainnya menginginkan tokoh paduan Islam dan nasionalis.

Suwardi juga menjelaskan, tiga besar untuk bursa wakil wali kota Solo diisi Ketua DPD Golkar Solo Sekar Tandjung, RA Yashinta Sekarwangi, dan Rektor UNSA Astrid.

“Saya membayangkan Indonesia itu sentral politiknya adalah Solo. Oleh karena itu, maka pertarungan di Solo tidak sekadar perebutan kursi wali dan wakil wali kota, tetapi juga gengsi partai politiknya,” katanya.

Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyebut Partai Gerindra dan Partai Golkar siap memberikan dukungan bila Kaesang maju di Pilkada Solo.

“Gusti Bhre (Mangkunegoro X) kami sudah melakukan komunikasi, tapi baru komunikasi santai. Sekar (Tandjung) belum

komunikasi intens soal Pilkada, mungkin baru internal Golkar, antarpantai belum. Kalau Mas Kaesang mau turun ke Pilkada Solo kami semakin pede, peluangnya semakin besar, Gerindra dan Golkar juga sudah oke,” kata Yogo, Sabtu, 9 Maret 2024.

Yogo menilai standar Wali Kota Solo harus tinggi. Penerus Wali Kota Solo, katanya, memiliki pekerjaan rumah menyamai atau melebihi capaian Gibran.

“Mas Gibran di Solo standar yang ditinggalkan sudah tinggi. PR penerusnya harus bisa menyamai standar Mas Gibran syukur bisa lebih. Dapat dilihat dari PAD, ekonomi, semua tren positif,” ujarnya.

PSI cenderung melihat pemimpin muda yang akan diusung. Dengan modal raihan kursi di DPRD Solo, PSI ingin memunculkan calonnya sendiri di Pilkada Solo.

“Kami intens komunikasi dengan Gerindra dan Golkar. Kami juga menunggu teman-teman PAN di Solo. Semakin banyak parpol yang bergabung kita akan semakin pede, menghadapi PDIP dan koalisi PKS,” ucapnya.

Di sisi lain, PSI DKI Jakarta menjagokan nama Kaesang Pangarep sebagai calon Gubernur DKI Jakarta karena dinilai sebagai sosok yang baik.

“Untuk Mas Kaesang, menurut saya, beliau sosok figur yang sangat baik,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana, di Kantor DPW PSI DKI Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024.

Jika nantinya Kaesang mampu memenuhi persyaratan administratif pendaftaran calon gubernur DKI, maka PSI tidak segan untuk mengusungnya. Selain Kaesang, dia juga memiliki nama beberapa figur-figur internal yang juga layak menjadi pemimpin Jakarta.

“Selain Mas Kaesang, kami juga ada sosok Sis Grace yang suaranya terbesar di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, DKI III,” ujarnya.

Grace Natalie mendapat suara terbanyak pada Pileg 2024 Daerah Pemilihan DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Dari dapil itu, dia berhasil mendapat perolehan 193.556 suara. Hal ini membuktikan Grace juga dipercaya oleh warga Jakarta Barat hingga Jakarta Utara.

“Dari perolehan suara Sis Grace yang luar biasa itu saya kira kepercayaan masyarakat ke Sis Grace itu besar,” ujarnya.

Dengan demikian, dia menilai nama Kaesang

dan Grace merupakan figur internal PSI yang layak untuk menjadi Gubernur ataupun Wakil Gubernur DKI Jakarta.

PSI, kata William, mengeklaim warga DKI Jakarta sudah tidak lagi menginginkan Anies Baswedan untuk berkuasa. Klaim itu didasarkan pada raihan suara Anies dalam Pilpres 2024 di DKI Jakarta.

William mengatakan, Anies merupakan antitesis dari sosok Jokowi. Se-

mentara, warga Jakarta masih ingin dipimpin oleh sosok yang memiliki pemahaman seperti Jokowi.

“Saya lihat warga DKI Jakarta sebenarnya sudah tidak menginginkan lagi Pak Anies. Kenapa? Karena Pak Anies sendiri di Jakarta perolehan suara capres itu di bawah 50 persen,” kata dia.

Menurut dia, itu merupakan tanda bahwa mayoritas warga DKI Jakarta sudah tidak ingin dipimpin oleh Anies. Sebaliknya, ada kerinduan warga dengan pemerintah Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi.

“Jadi kami melihat ada semacam kerinduan ya, untuk kita kembali ke jaman pemerintahan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta,” kata dia.

Menurut William, Jokowi adalah sosok yang benar-benar berbanding terbalik dengan Anies.

Jokowi disebut sebagai pemimpin yang tak banyak bicara. Namun, Jokowi banyak turun untuk bekerja.

“(Jokowi) berani mengeksekusi, berani mengambil terobosan. Jadi kami melihat ada kerinduan dari masyarakat utk kembali mempunyai gubernur seperti Pak Jokowi,” ujar dia. •RDO

